



# **RENCANA INDUK KELITBANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022-2027**



**BALAI PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

# RENCANA INDUK KELITBANGAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2022-2027



BALAI PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021



# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I - PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum .....	6
1.3. Tujuan dan Sasaran.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II - GAMBARAN UMUM KELITBANGAN</b> .....	<b>11</b>
2.1. Gambaran Umum Wilayah.....	11
2.2. Kondisi Sumber Daya Kelitbangan.....	27
2.3. Potensi dan Permasalahan .....	31
2.4. Peluang dan Tantangan.....	32
<b>BAB III - ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN</b> .....	<b>35</b>
3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .....	35
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Daerah .....	40
3.3. Indikasi Program Prioritas Kelitbangan Daerah .....	42
<b>BAB IV - STRATEGI PELAKSANAAN</b> .....	<b>102</b>
4.1. Kelembagaan .....	105
4.2. Evaluasi Pelaksanaan.....	113
<b>BAB V - PENUTUP</b> .....	<b>117</b>
<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	<b>119</b>

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi DIY dan Nasional Tahun 2016-2020-----	2
Tabel 2.1. Jumlah Desa Menurut Kabupaten/Kota dan Letak Geografis Di DIY -----	12
Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di DIY Tahun 2015-2020 (Jiwa)-----	19
Tabel 2.3. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2016-2020-----	21
Tabel 2.4. Perkembangan Rasio Gini DIY dan Nasional Tahun 2016-2020-----	24
Tabel 2.5. Indeks Pembangunan Manusia DIY dan Nasional Tahun 2016-2020-----	25
Tabel 2.6. Indeks Pembangunan Gender (IPG) DIY dan Nasional Tahun 2016-2020-----	25
Tabel 2.7. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) DIY dan Nasional Tahun 2016-2020-----	26
Tabel 2.8. Persentase Penduduk Miskin DIY dan Nasional Tahun 2016-2020-----	27
Tabel 3.1. Tema Kelitbangan Bidang Tata Kelola Pemerintahan-----	44
Tabel 3.2. Tema Kelitbangan Bidang Sosial-Budaya -----	62
Tabel 3.3 Tema Kelitbangan Bidang Ekonomi Pembangunan Pemerintah Daerah DIY, Tahun 2022 - 2027 -----	82
Tabel 3.4. Tema Kelitbangan Bidang Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) DIY Tahun 2022 - 2027-----	99

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta Administrasi DIY -----	12
Gambar 2.2. Peta Penggunaan Lahan DIY -----	15
Gambar 2. 3. Peta Perencanaan Kawasan Strategis DIY Tahun 2019-2039 -----	18
Gambar 2.4. Komposisi Penduduk DIY Tahun 2019 Berdasarkan Usia	20
Gambar 2.5. Peta Kepadatan Penduduk DIY -----	22
Gambar 2.6. Pertumbuhan Ekonomi DIY dan Nasional Tahun 2016-2020 -----	23
Gambar 2.7. Inflasi DIY dan Nasional Tahun 2016-2020-----	23
Gambar 3.1. <i>Cross Cutting</i> Tema Kelitbangan Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Perekonomian, Sosial Kemasyarakatan serta Prasarana dan Sarana (Infrastruktur) -----	103



# KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan dengan dukungan segenap pihak maka Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2022-2027 dapat diselesaikan. RIK DIY Tahun 2022-2027 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sesuai Peraturan Gubernur tersebut, fungsi kelitbangan melekat pada Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah (BPPSD) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) BAPPEDA DIY.

Pemerintah Daerah (DIY dan Kabupaten/Kota) bukanlah aktor satu-satunya dalam mendorong kegiatan kelitbangan, maka kami berharap keberadaan dokumen RIK ini dapat mendorong sinergi dan kolaborasi di antara para pelaku kelitbangan di wilayah DIY baik dari Perguruan Tinggi (PTN/PTS), Kementerian/Lembaga, Swasta, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan yang lain.

Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah terlibat memberi masukan, saran, kritik dan koreksi dalam penyusunan dokumen ini, baik dari OPD di lingkungan Pemda DIY dan Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian/Konsultan Swasta. Semoga dokumen RIK DIY Tahun 2022-2027 dapat berkontribusi bagi kemajuan kelitbangan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan kelitbangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala BAPPEDA DIY

Drs. Beny Suharsono, M.Si.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan salah satu fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah sebagai salah satu pengambil kebijakan. Berdasarkan konsep pembangunan, terkandung makna-makna alokasi sumber-sumber daya, regulasi dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan sebagai metode alokasi sumber-sumber daya (*resources*) yang dimiliki publik, seperti sumber daya alam, sumber daya energi, sumber dana dan sumber daya manusia.

Dalam perspektif ini, pembangunan diharapkan dapat memperluas akses publik untuk memperoleh sumber-sumber daya yang diperlukan guna mencapai kesejahteraan masyarakat, mempermudah akses publik untuk memperoleh dan menikmati berbagai fasilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, keamanan, dan lain-lain), serta menjamin ketersediaan infrastruktur dan kontinuitas sumber-sumber daya tersebut bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Terkait khususnya dengan peningkatan kesejahteraan, salah satu aspek pembangunan yang penting adalah penciptaan pertumbuhan ekonomi yang akan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat di mana akhirnya akan menciptakan kondisi yang dibutuhkan (*necessary condition*) untuk pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut membutuhkan ketersediaan modal fisik (*physical capital*),

sumber daya manusia (*human capital*), sumber daya alam (*natural resources capital*) dan modal sosial (*social capital*).

Selama periode 2016-2020 pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020 sedangkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) lebih tinggi dari pada pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama. Pada 2020 baik DIY dan nasional mengalami pertumbuhan negatif dikarenakan efek Pandemi Covid 19.

**Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi DIY dan Nasional  
Tahun 2016-2020**

Tahun	DIY (%)	Nasional (%)
2016	5,05	5,03
2017	5,26	5,07
2018	6,20	5,17
2019	6,60	5,09
2020	-0,68	-2,07

Sumber :BPS DIY (2021)

Pandemi *Covid-19* yang terjadi secara global sejak Maret 2020 di Indonesia, telah memaksa pemerintah untuk merencanakan pembangunan secara lebih kompromistis dalam penanganan *Covid-19*, mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi, mengatasi resiko fiskal yang masih tinggi, terjadinya kesenjangan kemiskinan yang semakin lebar, serta kontraksi ketenagakerjaan karena banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja. Oleh karena itu, selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dari dampak Pandemi Covid-19, proses perencanaan pembangunan DIY yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terus diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya melalui proses pembangunan. Pembangunan adalah sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya baik dari aspek ekonomi, politik, budaya sosial maupun sarana prasarana.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah berkaitan erat dengan proses perencanaan serta kualitas kebijakan pembangunan yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Namun demikian, baik proses perencanaan maupun penyusunan kebijakan pembangunan yang berkualitas masih menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, tak terkecuali Pemerintah Daerah DIY. Adapun ciri dari kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang bersifat aplikatif dan disusun berdasarkan bukti-bukti (*evidence*) yang bersifat terkini, relevan, representatif, dan valid. Kegiatan penelitian dan pengembangan idealnya dilakukan untuk menyediakan bukti secara ilmiah terhadap permasalahan pembangunan, sehingga pengambilan kebijakan akan dihasilkan dari bukti tersebut.

Kegiatan penelitian idealnya juga linear dengan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah DIY, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata, data yang relevan, dan mampu mendukung system pengambilan keputusan untuk kebijakan berbasis *evidence*. Selain itu, Pemerintah DIY sebagai role model dalam Smart Government, mengintegrasikan perencanaan pembangunan berbasis riset, menghasilkan riset-riset berdampak, meningkatkan manfaat riset bagi masyarakat dan pemerintah. Kemudian Pemerintah DIY perlu membangun big data hub, untuk memperkuat implementasi *cascading* konektivitas antara program and system, mengintegrasikan *spatial - sectoral - thematic planning*, dan memperkuat *evidence-based policy*, sehingga hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Sebagai UPT Bappeda DIY, Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah (BPPSD) bertugas untuk melakukan tugas penelitian dan pengembangan (kelitbangan) yang berbasis data statistik untuk menyediakan masukan bagi perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah. Rasionalitas, data, penelitian, temuan dan rekomendasi berperan sangat penting bagi kualitas perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan disusun berdasarkan pertimbangan pengetahuan, bukti data dan rekomendasi hasil penelitian terkini (*evidence and knowledge-based development planning*).

Rekomendasi hasil penelitian yang bertumpu pada data di masyarakat dan pengetahuan tentang ke mana pembangunan daerah akan diarahkan di masa datang membantu pemerintah daerah dalam menyampaikan hasil pembangunan untuk masyarakat dengan cara yang tepat (*delivery mechanism*) --sehingga mendorong masyarakat turut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan secara partisipatif-- dan sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah daerah bersikap visioner melalui perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP) sehingga masyarakat bisa diarahkan ke pencapaian visi-misi tertentu yang telah dirumuskan berbasis data dan pengetahuan. Dalam kaitan itu, BPPSD menyediakan masukan kebijakan berdasarkan hasil kelitbang - bekerjasama dengan OPD, tenaga ahli dan perguruan tinggi-- agar *evidence and knowledge-based policy bisa dihasilkan untuk pencapaian visi-misi pembangunan DIY.*

Pemerintah DIY diharapkan mampu membangun relevansi dan keakuratan hasil penelitian dan pengembangan akan membantu pemerintah dalam menentukan arah kebijakan serta perencanaan pembangunan yang tepat. Oleh karena itu, terkait dengan proses pembangunan DIY, diperlukan suatu dokumen yang dapat memandu para peneliti dalam memilih tema yang sesuai agar dapat melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang relevan dengan kondisi DIY serta sejalan dengan kebutuhan perencanaan pembangunan di lingkup Pemerintah Daerah DIY.

Oleh karena itu, seperti yang tertuang didalam RKPD DIY Tahun 2022, maka program/kegiatan Litbang yang lebih efektif menunjang pembangunan daerah, membutuhkan upaya peningkatan jumlah dan kualitas program/kegiatan penelitian dan pengembangan yang lebih berbobot pula, sehingga diharapkan dapat memberi manfaat bagi upaya pemecahan masalah-masalah dalam pencapaian tujuan, Hal ini perlu disadari bersama, bahwa program/kegiatan pembangunan pada hakekatnya diselenggarakan untuk tujuan memecahkan masalah-masalah yang terjadi dan dihadapi dalam lingkungan masyarakat bangsa.

Dalam kerangka mewujudkan fungsi dan tugas bidang kelitbang, peranan Unit Litbang Pemerintah Daerah antara lain adalah sebagai dapur kebijakan (*think-tank*) penyelenggaraan pemerintah daerah dengan

memfasilitasi berbagai langkah kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembangunan pada umumnya maupun secara khusus dalam kerangka peningkatan kinerja kelitbang di daerah, Dalam hal ini, upaya pengelolaan kegiatan penelitian dan pengembangan seharusnya dilakukan dalam sistem dan prosedur pengelolaan litbang satu pintu.

Untuk mewujudkan hal tersebut, disadari bahwa masih terdapat sejumlah masalah dan tantangan yang dihadapi berkaitan masalah bidang kelitbang, termasuk diantaranya adalah persoalan klasik berkenaan eksistensi dan peran litbang. Dalam hal ini, eksistensi dan peran unit kelembagaan Litbang di daerah pada umumnya dirasakan masih belum berdaya memenuhi ketentuan kebijakan bidang kelitbang dan ristek, antara lain Permendagri 20 Tahun 2011, Permendagri 36 Tahun 2012, Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri tentang Penguatan SIDA (Sistem Informasi Daerah).

Sementara itu, kebijakan-kebijakan regulatif dan perangkat instrumen pendukung kebijakan di bidang Litbang dan Ristek secara umum belum kondusif dapat dimplementasikan secara efektif di daerah-daerah, Hal tersebut kiranya tidak dapat dipisahkan pula dengan persoalan komitmen dan persepsi yang muncul di kalangan aparatur daerah yang masih belum sesuai kehendak melakukan pemberdayaan unit kelembagaan Litbang di daerah-daerah, Dalam kondisi demikian sesungguhnya pula berhubungan erat dengan persoalan masih kurangnya informasi karena terbatasnya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang kelitbang dan ristek.

Di sisi lain, terdapat banyak potensi kelitbang di wilayah DIY baik berupa kelembagaan litbang, lemlit, serta sumberdaya manusia tenaga ahli/peneliti dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi dengan beragam gagasan inovasi yang sangat kreatif. Kita juga telah banyak mendengar, mengetahui dan menyaksikan fenomena bermunculannya beragam hasil-hasil kajian teknologi tepat guna, produk inovasi baru dan industri kreatif yang dapat dikembangkan untuk kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat bangsa.

Dengan melihat pentingnya arah kebijakan dan strategi kelitbangan, maka Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan DIY2022-2027 disusun dengan mempertimbangkan:

1. Dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Gubernur DIY periode 2022-2027
2. Arah kebijakan dan strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi. Daerah Istimewa Tahun 2005-2025
3. Arah kebijakan dan strategi Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY 2017-2022
5. Dokumen Meta Program Perangkat Daerah Pemerintah Daerah DIY
6. Dokumen Kebijakan Strategis (Jakstra) Riset Daerah dan Agenda Riset Daerah (ARD) DIY

## **1.2. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

6. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025.
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 - 2022

### **1.3. TUJUAN DAN SASARAN**

#### **A. Tujuan Rencana Induk Kelitbangan DIY adalah:**

1. Tujuan disusunnya Rencana Induk Kelitbangan DIY adalah memetakan kegiatan penelitian dan pengembangan agar dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan DIY sesuai yang tertuang di dalam dokumen perencanaan pembangunan;
2. Memberikan masukan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY (RPJMD DIY) 2022-2027, sehingga dapat mengakomodir kebutuhan program Kelitbangan dalam lingkup Pemerintahan Daerah DIY.
3. Memberikan arah bagi OPD Pemda DIY dan stakeholder terkait untuk melakukan kajian secara integrative dan memiliki konektivitas dalam mengatasi permasalahan di DIY.

## **B. Sasaran Rencana Induk Kelitbangan DIY adalah**

1. Menetapkan program prioritas penelitian dan pengembangan yang relevan dengan kondisi DIY dan kebutuhan perencanaan pembangunan
2. Memberikan arah pelaksanaan kegiatan kelitbangan Pemerintah Daerah DIY guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan.
3. Memberikan arah bagi OPD Pemda DIY dan stakeholder terkait untuk melakukan kajian yang diperlukan

## **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Induk Kelitbangan:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Sasaran
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN UMUM KELITBANGAN**

- 2.1. Gambaran Umum Wilayah
- 2.2. Kondisi Sumber Daya Kelitbangan
  - 2.2.1. Kelembagaan
  - 2.2.2. Sumber Daya Manusia Kelitbangan
  - 2.2.3. Pendanaan Kelitbangan
  - 2.2.4. Kerjasama Kelitbangan
- 2.3. Potensi dan Permasalahan
- 2.4. Peluang dan Tantangan

### **BAB III ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN**

- 3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
  - 3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Panjang Pembangunan Daerah
  - 3.1.2. Visi dan Misi

## 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Daerah

### 3.2.1. Arah Kebijakan

### 3.2.2. Strategi

## 3.3. Indikasi Program Prioritas Kelitbangan Daerah

### 3.3.1. Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

### 3.3.2. Program Prioritas Bidang Sosial dan Masyarakat

### 3.3.3. Program Prioritas Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah

### 3.3.4. Program Prioritas Bidang Sarana Prasarana (Infrastruktur)

## BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN

### 4.1. Kelembagaan

#### 4.1.1. Koordinasi Pelaksanaan

#### 4.1.2. Keterlibatan Institusi Kelitbangan

#### 4.1.3. Kerjasama dan Sinergitas Pelaksanaan

### 4.2. Evaluasi Pelaksanaan

## BAB V PENUTUP



## BAB II

# GAMBARAN UMUM KELITBANGAN

### 2.1. GAMBARAN UMUM WILAYAH

#### 2.1.1. Aspek Geografi dan Administrasi

Secara astronomis, DIY terletak diantara 7°33'-8°12' Lintang Selatan dan 110°00'-110°50' Bujur Timur. Secara geografis, DIY terletak di bagian tengah Pulau Jawa sisi selatan yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dengan perbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, sementara sebelah selatan DIY berbatasan dengan Samudra Hindia.

Luas wilayah DIY adalah 3.133,15 km<sup>2</sup> atau 0,16 % dari total luas Indonesia (1.916.906,77 km<sup>2</sup>). DIY merupakan daerah setingkat provinsi dengan luas terkecil setelah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Secara pemerintahan, wilayah kabupaten/kota DIY dibagi menjadi 4 kabupaten dan 1 kota yaitu Kabupaten Gunungkidul, Sleman, Bantul dan Kulon Progo serta Kota Yogyakarta. Sementara struktur pemerintah di bawah kabupaten/kota meliputi 78 kecamatan dan terdapat 438 desa/kelurahan. Wilayah kabupaten/kota di DIY yang terluas adalah Kabupaten Gunungkidul, yaitu meliputi 45,69 % dari luas DIY sedangkan wilayah terkecil adalah Kota

Yogyakarta, yaitu sebesar 1,04% yang secara lengkap perbandingan luasan antara wilayah disajikan pada gambar berikut ini.



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY, 2020

**Gambar 2.1. Peta Administrasi DIY**

DIY tidak memiliki kawasan pedalaman maupun kawasan terpencil. Menurut kondisi geografis, desa-desa di DIY terletak di daerah pesisir, lereng/punggung bukit, dan daerah dataran. Jumlah desa di DIY menurut letak geografis tersebut disajikan dalam tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2.1. Jumlah Desa Menurut Kabupaten/Kota dan Letak Geografis Di DIY**

Kabupaten/ Kota	Ibukota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Pesisir	Lembah/ DAS	Lereng/ Punggung Bukit	Dataran
Kulon Progo	Wates	12	88	10	-	22	66
Bantul	Bantul	17	75	5	-	13	62
Gunungkidul	Wonosari	18	144	18	2	55	87
Sleman	Sleman	17	86	-	-	15	71
Kota Yogyakarta	Yogyakarta	14	45	-	-	-	45
DIY	Yogyakarta	78	438	33	2	105	331

Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2020

Ditinjau dari posisi geostrategis, DIY terletak di bagian tengah Pulau Jawa bagian Selatan. Hal ini menjadikan DIY berbatasan langsung dengan

Samudra Hindia yang kaya akan sumberdaya laut dan menjadikan DIY memiliki wilayah berupa kepulauan. DIY memiliki 28 pulau yang masuk dalam wilayah Kabupaten Gunungkidul yang tersebar pada lima kecamatan, yaitu Purwosari, Panggang, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo.

### **2.1.1. a. Penggunaan Lahan**

Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pemerintah provinsi mempunyai fungsi dan peran memberikan arahan dan pembinaan kepada kabupaten/kota dan masyarakat dalam bentuk monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang serta arahan kebijakan melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Melalui pembinaan ini diharapkan adanya peningkatan dalam kesesuaian pemanfaatan ruang baik oleh masyarakat maupun kabupaten/kota terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota dan RTRW provinsi. Untuk mengukur sasaran ini digunakan indikator Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW provinsi yang diukur dari perbandingan luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW dibandingkan dengan luas total wilayah pemanfaatan ruang.

Selain itu, juga perlu memperhitungkan kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari struktur ruang yang dihitung dengan membandingkan struktur ruang eksisting terhadap struktur ruang RTRW DIY. Target kinerja untuk sasaran kesesuaian pemanfaatan ruang, pencapaian untuk tahun 2020 mengalami peningkatan dan namun tidak mencapai target. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW provinsi yang meningkat capaiannya adalah sebesar 78,95 %. Indikator ini diukur dari perbandingan luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW dibandingkan dengan luas total wilayah pemanfaatan ruang. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini berarti 95,70 % dari target kinerja akhir RPJMD sebesar 82,5 %.

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR No. 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Permen

ATR No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Audit Tata Ruang maka capaian indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2019 diperoleh dari hasil perhitungan kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan perbandingan antara peta pola ruang dengan penggunaan lahan eksisting. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2018 sebesar 77,05 %, sedangkan pada tahun 2019 mencapai 78,85 % atau melebihi target tahun 2019 yaitu 78,00 % sehingga persentase realisasi tahun 2019 adalah 101,09 %. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 82,5 % maka capaian tahun 2019 sebesar 95,58 %. Perhitungan kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan hasil pemantauan dianalisis dengan membandingkan antara kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan budidaya dengan luas Kawasan lindung dan luas Kawasan budidaya. Kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan lindung diperoleh dari pemanfaatan ruang

Kawasan lindung eksisting dibandingkan dengan luas pemanfaatan ruang kawasan lindung pada RTRW, sedangkan kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan budidaya diperoleh dari pemanfaatan ruang kawasan budidaya eksisting dibandingkan dengan luas pemanfaatan ruang kawasan budidaya pada RTRW. Terdapat tiga klasifikasi yakni sesuai, tidak sesuai, dan belum terwujud melalui proses superimpose antara peta rencana pola ruang dengan peta penggunaan lahan tahun 2020.



Sumber Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY, 2020

**Gambar 2.2. Peta Penggunaan Lahan DIY**

Berdasarkan perhitungan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang, kesesuaian penggunaan lahan di DIY pada tahun 2017 terhadap pola ruang RTRW DIY Perda Nomor 5 Tahun 2019 sebesar 78,95 %. Kesesuaian kawasan lindung dan kawasan budidaya dapat diketahui bahwa pemanfaatan ruang pada kawasan lindung di DIY sebesar 86,61 % dengan ketidaksesuaian sebesar 13,39 %. Ketidaksesuaian pada kawasan lindung diantaranya adanya aktivitas budidaya pada kawasan sempadan sungai. Sedangkan kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan budidaya di DIY sebesar 78,48 %, belum terwujud sebesar 16,18 % dan tidak sesuai sebesar 5,34 %. Prosentase dukungan belum terwujudnya kawasan budidaya adalah pada kawasan peruntukan industri yang belum terwujud.

### 2.1.1.b. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah DIY sesuai dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY Tahun 2019-2039, untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah berada pada kawasan budidaya dan kawasan strategis provinsi. Berdasarkan Perda DIY No 5 Tahun 2019 tersebut, potensi pengembangan wilayah sesuai dengan rencana pola ruang yang berada pada kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan dan kawasan peruntukan lainnya. Sedangkan potensi pengembangan wilayah sesuai dengan struktur ruang wilayah yang berada pada kawasan strategis provinsi terdiri atas kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

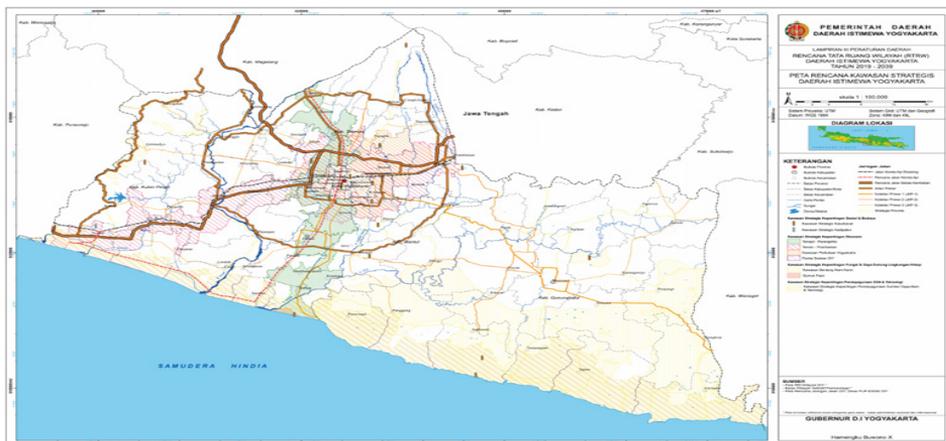
Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya terdiri atas kawasan strategis kasultanan dan kawasan strategis kadipaten. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas Kawasan Perkotaan Yogyakarta, Kawasan Temon-Prambanan, Kawasan Tempel - Parangtritis, dan Kawasan Pantai Selatan DIY. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi yaitu Kawasan Pantai Selatan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dan Gelombang Laut di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul.

Potensi pengembangan wilayah DIY sesuai dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY, berada pada kawasan budidaya dan kawasan strategis provinsi. Berdasarkan kajian peninjauan Perda DIY No 5 Tahun 2019 tentang RTRW DIY, potensi pengembangan wilayah sesuai dengan rencana pola ruang kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan budidaya lainnya. Sedangkan potensi pengembangan wilayah sesuai dengan kawasan strategis provinsi terdiri atas kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya terdiri atas kawasan strategis kasultanan dan kawasan strategis kadipaten. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas Kawasan Perkotaan Yogyakarta, Kawasan Temon-Prambanan, Kawasan Tempel-Parangtritis, dan Kawasan Pantai Selatan DIY. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi terdiri atas Kawasan Pantai Selatan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dan Gelombang Laut di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul.

Sesuai dengan materi reviu RTRW DIY terdapat beberapa perubahan yang mempengaruhi perubahan potensi pengembangan wilayah. Perubahan yang terdapat materi reviu RTRW DIY di antaranya adanya perubahan sistem perkotaan, di mana Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang semula ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Wates dan Wonosari,

menjadi ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Temon – Wates dan Kawasan Perkotaan Wonosari. Perubahan signifikan lainnya yaitu dengan adanya pengembangan bandar udara baru dan kota bandara (*Airport City*) serta Aerotropolis di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, pengembangan jaringan dan layanan perkeretaapian bandar udara baru Yogyakarta di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, pelabuhan laut di Pantai Selatan, serta pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional.



Sumber: Lampiran Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang RTRW DIY tahun 2019 – 2039

**Gambar 2. 3. Peta Perencanaan Kawasan Strategis DIY Tahun 2019-2039**

### 2.1.2. Demografi

Jumlah penduduk DIY pada tahun 2020 sebanyak 3.882.288 jiwa. Selama beberapa tahun terakhir, sex ratio penduduk DIY selalu ada di atas 97 %, yang berarti bahwa proporsi dari jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. *Sex ratio* jumlah penduduk DIY pada tahun 2020 adalah 98,01.

**Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di DIY Tahun 2015-2020 (Jiwa)**

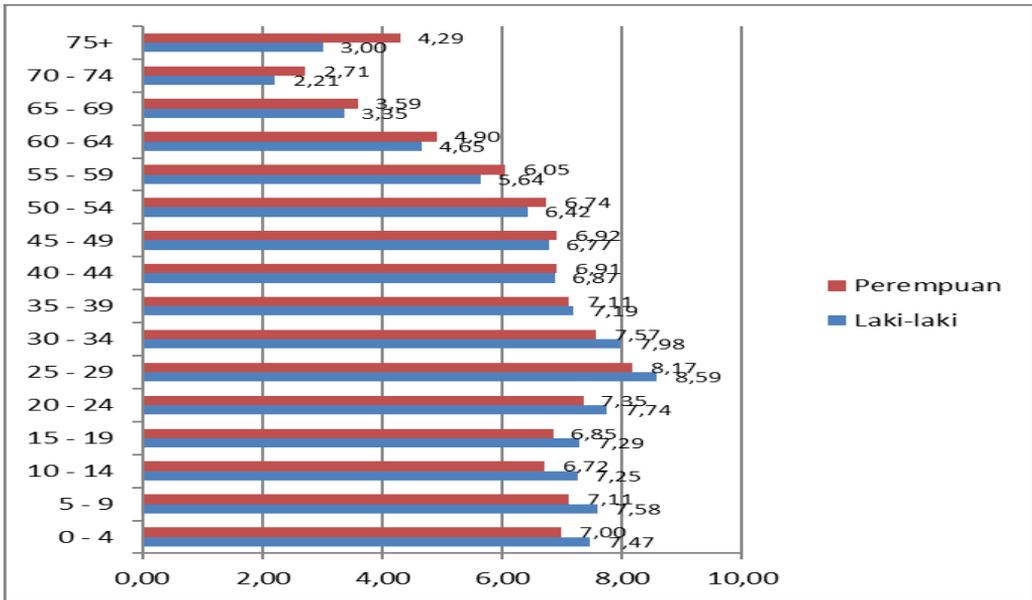
Jenis Kelamin	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020*)
Laki-Laki	1.818.765	1.839.951	1.860.900	1.887.294	1.901.763	1.921.605
Perempuan	1.860.411	1.880.961	1.901.300	1.930.972	1.941.169	1.960.683
Jumlah	3.679.176	3.720.912	3.762.200	3.818.266	3.842.932	3.882.288
Sex Ratio	97,76	97,82	97,88	97,73	97,97	98,01

Sumber: BPS DIY Dalam Angka 2021

Keterangan: \*) Angka Proyeksi

Persebaran penduduk antar wilayah DIY tidak merata. Kabupaten Sleman adalah wilayah berpenduduk terbanyak, yaitu sebanyak 1.219.640 jiwa atau 31,73% dari total penduduk DIY. Kemudian, Kabupaten Bantul adalah wilayah berpenduduk paling padat kedua yaitu sebanyak 1.018.402 jiwa atau sekitar 26,50%. Sementara itu, wilayah yang berpenduduk tersedikit adalah Kabupaten Kulon Progo yaitu sebanyak 430.220 jiwa (11,20%).

Berdasarkan proporsi penduduk menurut usia, mayoritas penduduk DIY mempunyai usia produktif. Kelompok tersebut terdiri dari kelompok usia 25-29 tahun atau sekitar 16,76 % dari seluruh penduduk dan usia 30-34 tahun sekitar 15,55 %. Dengan kondisi sumber daya manusia tersebut, dapat diindikasikan bahwa potensi sumber daya manusia yang berusia produktif di DIY cukup besar dan merupakan modal sumber daya manusia yang produktif bagi pembangunan di DIY. Komposisi penduduk berdasarkan umur dapat terlihat dalam gambar piramida penduduk berikut.



Sumber BPS DIY Dalam Angka 2020

**Gambar 2.4. Komposisi Penduduk DIY Tahun 2019 Berdasarkan Usia**

Laju pertumbuhan penduduk dapat digambarkan dalam sebuah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk setiap tahun di antara rentang waktu tertentu. Angka ini dinyatakan dalam persentase dari penduduk dasar. Pertambahan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Di dalam demografi dikenal istilah pertambahan penduduk alami dan pertambahan penduduk total. Dimana pertambahan penduduk alami hanya di pengaruhi oleh kelahiran dan kematian, sedangkan pertambahan penduduk total di pengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk (imigrasi) dan migrasi keluar (emigrasi). Dari data BPS (DIY Dalam Angka 2020), tercatat bahwa laju pertumbuhan penduduk di DIY tahun 2016 - 2020 rata-rata sebesar 1,10%, pada 2020 laju pertumbuhan terkecil di Kabupaten Gunungkidul sebesar 0,88% dan tertinggi di Kabupaten Bantul sebesar 1,14%.

**Tabel 2.3. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2016-2020**

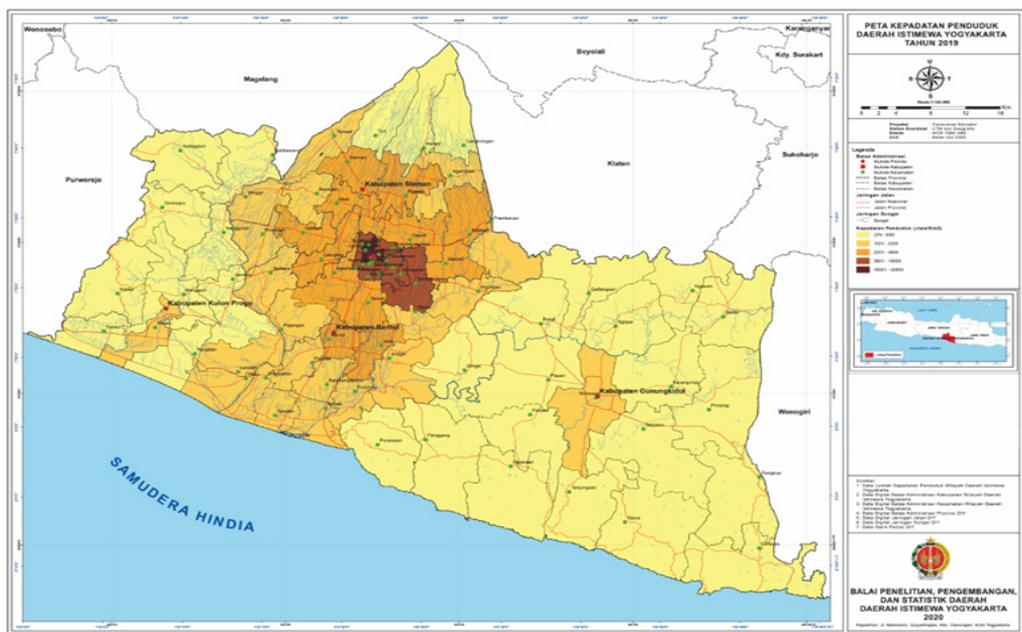
Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020*)
Kabupaten Kulon Progo	1,09%	1,11%	1,06%	1,05%	0,99%*
Kabupaten Bantul	1,24%	1,19%	1,15%	1,16%	1,14%*
Kabupaten Gunungkidul	1,01%	0,95%	0,94%	0,89%	0,88%*
Kabupaten Sleman	1,11%	1,10%	1,11%	1,07%	1,06%*
Kota Yogyakarta	1,22%	1,19%	1,13%	1,04%	0,93%*
DI Yogyakarta	1,13%	1,11%	1,08%	1,15%	1,02%*

Sumber: BPS DIY Dalam Angka 2021

Keterangan: \*) Angka Proyeksi

Secara umum, kepadatan penduduk DIY pada tahun 2019 mencapai 1.206 jiwa per km<sup>2</sup>. Tingkat kepadatan penduduk di masing-masing kabupaten/kota dari tingkat kepadatan tertinggi ke terendah berturut-turut sebagai berikut:

- 1) Kota Yogyakarta, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 13.290 jiwa per km<sup>2</sup>,
- 2) Kabupaten Sleman, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 2.122 jiwa per km<sup>2</sup>,
- 3) Kabupaten Bantul, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 2.009 jiwa per km<sup>2</sup>,
- 4) Kabupaten Kulon Progo, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 734 jiwa per km<sup>2</sup>, dan
- 5) Kabupaten Gunungkidul, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 500 jiwa per km<sup>2</sup>.



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY, 2020

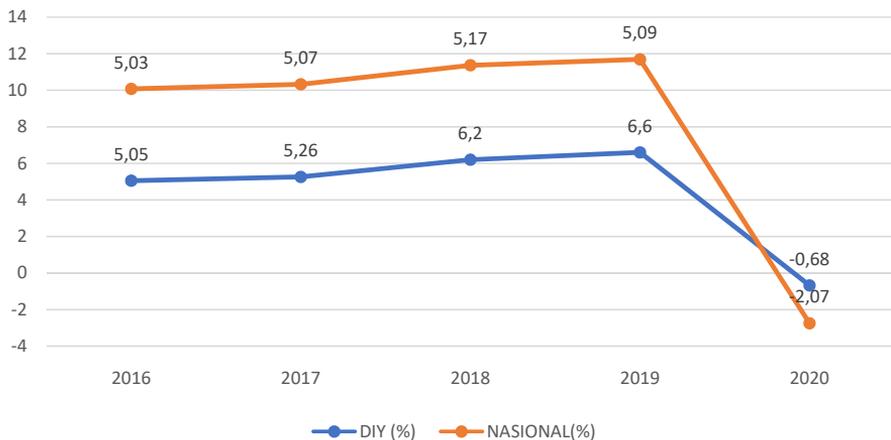
**Gambar 2.5. Peta Kepadatan Penduduk DIY**

### 2.1.3. Aspek Ekonomi

#### 2.1.3.a. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut BPS (2021), definisi pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB (Produk Domestik Bruto/Produk Domestik regional Bruto) atas dasar harga konstan. Selama periode 2016-2020 pertumbuhan ekonomi DIY lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Selama periode 2016-2020 pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020 sedangkan pertumbuhan ekonomi DIY lebih tinggi dari pada pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama. Pada 2020 baik DIY dan nasional mengalami pertumbuhan negatif dikarenakan efek pandemi Covid 19.

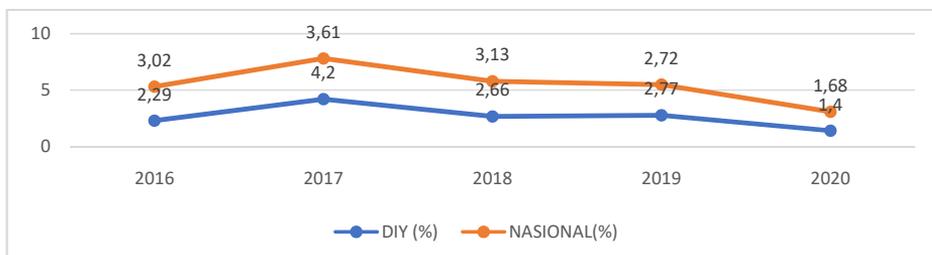


Sumber: BPS DIY Dalam Angka 2021

**Gambar 2.6. Pertumbuhan Ekonomi DIY dan Nasional Tahun 2016-2020**

### 2.1.3.b. Inflasi

Selama periode 2016-2020, inflasi yang terjadi cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2020, inflasi di DIY sebesar 1,40% lebih rendah dibanding realisasi inflasi di Jawa yakni 1,73% bahkan nasional, 1,68%. Rendahnya inflasi pada tahun 2020 merupakan dampak dari penurunan daya beli akibat pandemi Covid 19.



Sumber: BPS DIY Dalam Angka 2021

**Gambar 2.7. Inflasi DIY dan Nasional Tahun 2016-2020**

### 2.1.3.c. Ketimpangan Pengeluaran DIY (Rasio Gini)

Perkembangan Rasio Gini DIY selama periode 2016-2020 cenderung berfluktuasi baik untuk wilayah perdesaan dan perkotaan dan selalu lebih tinggi dari angka nasional. Per September 2020, Rasio Gini sebesar 0,437 dan itu berarti mengalami peningkatan jika dibandingkan pada bulan yang sama tahun 2019.

**Tabel 2.4. Perkembangan Rasio Gini DIY dan Nasional Tahun 2016-2020**

Tahun*)	Perdesaan	Perkotaan	DIY	Nasional
2016	0,343	0,423	0,425	0,394
2017	0,317	0,447	0,440	0,391
2018	0,326	0,421	0,422	0,384
2019	0,326	0,430	0,428	0,380
2020	0,329	0,436	0,437	0,385

Sumber: BPS DIY Dalam Angka 2021

Keterangan: \*) per September

Peningkatan Gini Rasio selama periode 2019 – 2020, dapat diduga terkait dengan dampak Pandemi Covid-19. Jika dibandingkan dengan provinsi lain, Gini Rasio DIY pada tahun 2020 yang sebesar 0,437 adalah tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data BPS DIY (2021), terdapat 7 provinsi (DIY, Gorontalo, DKI, Jawa Barat, Papua, Sultra, dan NTB) dengan Gini Ratio di atas Gini Ratio Nasional yang sebesar 0,385.

## 2.1.4. Kesejahteraan Sosial

### 2.1.4.a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian/level IPM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama periode 2015-2020 selalu meningkat dan lebih tinggi dari capaian IPM nasional. Pada tahun 2020, capaian IPM DIY mencapai level 79,97 dan berada dalam kategori “IPM Tinggi” dan mencapai peringkat kedua tertinggi setelah DKI Jakarta. Pada tahun 2020, IPM DIY sedikit mengalami penurunan dari 79,99 pada tahun 2019 menjadi 79,77 pada tahun 2020.

Menurut BPS DIY (2021), penurunan IPM DIY tahun 2020 tersebut dipengaruhi oleh penurunan indeks pada dimensi standar kehidupan yang layak yang tidak mampu dikompensasi oleh kenaikan indeks pada dimensi kesehatan dan dimensi pengetahuan. Untuk diketahui, rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan selama 2020 mencapai Rp14,02 juta dan turun 2,63 persen dibandingkan dengan tahun 2019 akibat Pandemi Covid-19.

**Tabel 2.5. Indeks Pembangunan Manusia DIY dan Nasional Tahun 2016-2020**

Tahun	DIY	Nasional
2016	78,38	70,18
2017	78,89	70,81
2018	79,53	71,39
2019	79,99	71,92
2020	79,77	71,94

Sumber: BPS DIY (2021)

#### 2.1.4.b. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Dalam perspektif gender, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipilah berdasarkan jenis kelamin pada laki-laki dan perempuan, yang kemudian disebut Indeks Pembangunan Gender (IPG). Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100 maka semakin setara pembangunan antara perempuan dan laki-laki dan sebaliknya.

Selama periode 2016-2020 IPG DIY selalu lebih tinggi dari angka IPG Nasional dan angka IPG DIY mendekati 100. Artinya pembangunan antara perempuan dan laki-laki di DIY relatif setara.

**Tabel 2.6. Indeks Pembangunan Gender (IPG) DIY dan Nasional Tahun 2016-2020**

Tahun	DIY	Nasional
2016	94,27	90,82
2017	94,39	90,96
2018	94,73	90,99
2019	94,77	91,07
2020	94,80	91,06

Sumber: BPS Provinsi DIY (2021)

Pembangunan gender dapat dilihat juga dari indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang mengukur partisipasi perempuan dalam politik dan ekonomi, yang meliputi dimensi keterwakilan perempuan di parlemen, pengambilan keputusan (proporsi jumlah perempuan pada posisi manajer, staf administrasi, pekerja profesional

dan teknisi), serta kesetaraan distribusi pendapatan antara perempuan dan laki-laki.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) DIY tahun 2016 hingga 2020 selalu dibawah angka IDG Indonesia. Dapat dikatakan bahwa partisipasi perempuan dalam beberapa bidang seperti ekonomi dan politik di DIY relatif masih rendah.

**Tabel 2.7. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) DIY dan Nasional Tahun 2016-2020**

Tahun	DIY	Nasional
2016	66,96	71,39
2017	69,37	71,74
2018	69,64	72,10
2019	73,59	75,24
2020	74,73	75,57

Sumber: BPS Provinsi DIY (2021)

#### 2.1.4.c. Kemiskinan

Selama periode 2016-2020 kemiskinan (perdesaan dan perkotaan) di DIY menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin (perdesaan dan perkotaan) di DIY sebesar 13,10% dan turun menjadi 12,80% pada tahun 2020. Jika dicermati, dibandingkan tahun 2019 kemiskinan (perdesaan dan perkotaan) tahun 2020 mengalami peningkatan yang saah satu penyebabnya adalah dampak dari pandemi COVID 19.

**Tabel 2.8. Persentase Penduduk Miskin DIY dan Nasional Tahun 2016-2020**

Tahun*)	Perdesaan (%)	Perkotaan (%)	Perdesaan & Perkotaan (%)	Nasional (%)
2016	16,27	11,68	13,10	10,70
2017	15,86	11,00	12,36	10,12
2018	14,71	10,73	11,81	9,22
2019	14,31	11,53	11,44	9,76
2020	14,57	12,17	12,80	10,19

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Keterangan: \*) per bulan September

Mengacu data BPS DIY (2021), tahun 2020 persentase penduduk miskin di perdesaan lebih besar dibandingkan di perkotaan. Persentase penduduk miskin di perdesaan sebanyak 14,57%. Dengan kata lain secara rata-rata terdapat sekitar 15 penduduk miskin di antara 100 orang penduduk di perdesaan. Selanjutnya persentase penduduk miskin di perkotaan sebanyak 12,17% atau terdapat 12 penduduk miskin dari 100 penduduk perkotaan di DIY.

Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2020 tersebut lebih tinggi dari rata-rata persentase penduduk miskin Indonesia yaitu sebesar 10,19%. Kondisi ini menjadikan DIY berada di posisi ke-11 dari seluruh provinsi di Indonesia. Provinsi paling tinggi persentase penduduk miskin adalah Papua (26,80%) dan paling rendah adalah Bali (4,45%). Provinsi yang paling dekat dengan peringkat DIY adalah Sumatera Selatan (12,98%) dan Lampung (12,76%).

## 2.2. KONDISI SUMBER DAYA KELITBANGAN

Dalam mendukung upaya pencapaian tugas dan fungsi kelitbangan Pemerintah Daerah DIY, diperlukan sumberdaya yang cukup meliputi sumberdaya manusia yang memenuhi kualifikasi, sumberdaya keuangan, kemampuan pengembangan jejaring dan ketersediaan sarana prasarana yang optimal.

### 2.2.1. Kelembagaan

Kelembagaan kelitbangan di DIY diatur di dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sesuai Peraturan Gubernur tersebut, fungsi kelitbangan melekat pada Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah (BPPSD) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) BAPPEDA DIY. BPPSD memiliki tugas melakukan penelitian, pengembangan, dan statistik sektoral untuk meningkatkan persentase rumusan bahan kebijakan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dan persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan khususnya melekat pada Seksi Penelitian dan Pengembangan yang memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Penelitian dan Pengembangan
2. Penyiapan bahan koordinasi penelitian dan pengembangan
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan
4. Pelaksanaan fasilitasi penelitian dan pengembangan
5. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
6. Pelaksanaan dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan
7. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Penelitian dan Pengembangan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT

### 2.2.2. Sumber Daya Manusia Kelitbangan

Sumber daya manusia Kelitbangan menurut Permendagri No. 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan tenaga lainnya. Jabatan fungsional keahlian yang dimaksud adalah pejabat fungsional peneliti, perekayasa, analis kebijakan dan pejabat

fungsional lain yang terkait fungsi kelitbangan. Tenaga lain yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan administrator, pengawas dan pelaksana atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

Dalam melaksanakan tugasnya pejabat fungsional peneliti mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti. Sumber daya kelitbangan pada Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah (BPPSD) DIY terdiri atas pejabat struktural, pejabat fungsional keahlian dan pejabat fungsional umum. Rincian jumlah personil pelaksana kelitbangan per September 2021, 4 (empat) pejabat struktural yang terdiri atas 1 (satu) Kepala BPPSD dan 3 (tiga) pejabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha; Kepala Seksi Data dan Statistik, dan Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan.

Saat ini (per September 2021), SDM yang dimiliki oleh Pemda DIY bidang riset dan perekayasaan adalah 5 (lima) orang tenaga riset, 2 (dua) orang sebagai perekayasa, 5 (lima) orang calon perekayasa dan 2 (dua) orang calon teknisi penelitian dan perekayasa. Selain itu, untuk mewujudkan kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan, peneliti dan perekayasa yang memiliki kepakaran di berbagai bidang yang terkait dengan urusan-urusan pemerintahan khususnya pemerintah daerah masih dibutuhkan.

### **2.2.3. Pendanaan Kelitbangan**

Kecukupan sumberdana dan keuangan bagi kegiatan kelitbangan sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian perencanaan kelitbangan dan inovasi daerah dalam mendukung penyempurnaan dalam perumusan perencanaan dan kebijakan daerah, baik yang disusun melalui Organisasi Perangkat Daerah OPD) maupun yang direncanakan dan dilaksanakan oleh kelitbangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penganggaran terhadap bidang penelitian dan pengembangan di Indonesia masih sangat tergolong kecil, dimana alokasi anggaran penelitian dan pengembangan di Indonesia tahun 2020 sebesar 0,25% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini juga berpengaruh pada penganggaran kelitbangan di daerah, namun demikian dengan kemampuan SDM yang ada diharapkan daerah dapat mengelola kelitbangan secara baik dan dapat meningkatkan hasil-hasil kelitbangan secara berkualitas, dan mampu memberikan dukungan yang optimal bagi pemerintah daerah.

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian sasaran program kelitbangan pada BPPSD BAPPEDA DIY menggunakan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun kesiapan dari Pemerintah Daerah DIY untuk dapat menangkap peluang pembiayaan tersebut diperlukan, salah satunya dengan memperluas jejaring, kapasitas sumber daya, regulasi dan lain sebagainya.

#### 2.2.4. Kerjasama Kelitbangan

Peningkatan kerjasama dengan mengembangkan jejaring (*networking*) dapat meringankan tugas-tugas kelitbangan dalam menyikapi keterbatasan kompetensi sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber anggaran. Selain itu keberadaan kolaborasi antar pemangku kepentingan kelitbangan dapat memberi sinergi positif bagi perkembangan daerah dari sisi program, penilaian dan pengembangan potensi daerah, serta perpaduan sumberdaya dan kepentingan.

Secara ketugasan BPPSD BAPPEDA DIY melakukan penelitian, pengembangan, dan statistik sektoral untuk meningkatkan persentase rumusan bahan kebijakan penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah. Akan tetapi keterbatasan yang ada menyebabkan kegiatan kelitbangan tidak secara keseluruhan dapat dilakukan oleh BPPSD BAPPEDA DIY. Kebijakan kelitbangan di DIY yang dituangkan dalam Rencana Induk Kelitbangan (RIK) perlu dilaksanakan baik dengan melakukan kerjasama kelitbangan maupun pembagian peran kelitbangan pada entitas-entitas peneliti di DIY, seperti universitas, lembaga vertikal dan lembaga penelitian yang lain.

Untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan OPD pengampu kegiatan sektoral masih dimungkinkan melaksanakan kegiatan kelitbangan dengan mempertimbangkan RIK sesuai dengan urusan yang diampu masing-masing OPD. Selain itu pemerintah melalui balai penelitian yang ada di daerah juga memiliki ketugasan melaksanakan kegiatan kelitbangan sesuai sektornya masing-masing sehingga yang dibutuhkan adalah koordinasi yang baik supaya hasil-hasil kelitbangan oleh balai penelitian di daerah bisa dimanfaatkan.

### **2.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

Potensi dan permasalahan dapat didefinisikan sebagai faktor pendorong dan penghambat yang berasal dari internal Pemda DIY. Dari kondisi yang ada, beberapa potensi dan permasalahan dalam pengembangan kegiatan kelitbangan di DIY dapat diidentifikasi. Kelitbangan dengan tema tata kelola pemerintahan, pembangunan ekonomi, sosial, sarana dan prasarana (infrastruktur) di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi dan permasalahan berikut ini:

#### **A. Potensi:**

1. Ketersediaan data pembangunan relatif tata kelola pemerintahan, pembangunan ekonomi, sosial, sarana dan prasarana (infrastruktur) komprehensif.
2. Ketersediaan pendanaan dan perencanaan kegiatan kelitbangan tata kelola pemerintahan, pembangunan ekonomi, sosial, sarana dan prasarana (infrastruktur) di DIY.
3. Relatif banyak program strategis pembangunan pembangunan ekonomi, sosial, sarana dan prasarana (infrastruktur) serta tata kelola pemerintahan di DIY.
4. Tersedia kerjasama pentahelix untuk mengatasi dampak kejadian luar biasa.

## **B. Masalah:**

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) fungsional peneliti di DIY dari sisi jumlah.
2. Belum optimal konektivitas tema riset tata kelola pemerintahan, pembangunan pembangunan ekonomi, sosial, sarana dan prasarana (infrastruktur) antar Lembaga baik OPD maupun diluar OPD.
3. Belum terintegrasi hasil-hasil penelitian antar Lembaga terutama tema tata kelola pemerintahan, pembangunan pembangunan ekonomi, sosial, sarana dan prasarana (infrastruktur)
4. Belum optimalnya dampak riset tema pembangunan terhadap masyarakat.
5. Belum optimalnya kerjasama kelitbangan antar daerah meliputi bidang tata kelola pemerintahan, pembangunan ekonomi, sosial, sarana dan prasarana infrastruktur).

## **2.4. PELUANG DAN TANTANGAN**

Peluang dan tantangan dapat didefinisikan sebagai faktor pendorong dan penghambat yang berasal dari eksternal Pemda DIY. Peluang dan tantangan dalam pelaksanaan kelitbangan tema tata kelola pemerintahan, pembangunan ekonomi, sosial, sarana dan prasarana (infrastruktur) di DIY sebagai berikut:

### **A. Peluang**

1. Keberadaan BRIDA dapat terwujudnya konektivitas dan sinergisitas riset di daerah menjadi lebih besar. Terutama dalam koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BRIDA maupun dalam OPD dan Lembaga lain yang terkait.
2. Adanya kebijakan dari pemerintah yang mengatur tentang pedoman kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang dapat menjadi acuan pengembangan kegiatan kelitbangan di DIY

3. Telah terbentuknya forum Jejaring Penelitian (Jarlit) yang menghubungkan Pemda DIY dengan perguruan tinggi, instansi vertikal, kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan penelitian sehingga dapat memudahkan koordinasi dalam memanfaatkan hasil-hasil penelitian untuk memberikan masukan terhadap pengambilan kebijakan

## **B. Tantangan**

1. Belum optimalnya koordinasi dalam forum Jarlit di DIY
2. Mensinergikan kepentingan riset dan inovasi pembangunan yang dilakukan Pemda DIY dengan Lembaga lain misalnya Swasta dan Perguruan Tinggi
3. Optimalisasi hasil riset dan inovasi pembangunan yang dilakukan oleh seluruh Lembaga yang disinergikan dengan dunia industri dalam proses hilirisasi.



## BAB III

# ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

### 3.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Arah kebijakan pembangunan daerah bertumpu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2005-2025. Dengan demikian arah kebijakan kelitbangan juga mengacu pada penguatan dan keselarasan arah kebijakan jangka panjang agar kelitbangan yang direncanakan di dalam dokumen ini dapat berkontribusi dalam target jangka panjang daerah.

#### 3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Panjang Pembangunan Daerah

Visi pembangunan DIY yang akan dicapai selama dua puluh tahun mendatang yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 2005-2025 adalah:

“Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.

Dalam pengembangan infrastruktur, visi tersebut terkait dengan masyarakat yang maju yaitu masyarakat yang makmur secara ekonomi sehingga perlu dikembangkan pembangunan bidang perekonomian baik yang menyangkut industri, perdagangan, pertanian, dan sektor jasa lainnya yang ditopang dengan pembangunan sarana prasarana ekonomi untuk

mendukung berbagai aktifitas baik ekonomi, investasi, pariwisata, sosial dan budaya berikut ini:

1. Kegiatan ekonomi melalui investasi, membuka usaha ekonomi produktif pada lokasi industri memerlukan peningkatan infrastruktur antara lain akses transportasi, komunikasi dan informasi antar wilayah.
2. Sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi di daerah yang semakin meningkat, menuntut ketersediaan infrastruktur khususnya kebutuhan listrik. Kebutuhan listrik di wilayah DIY dapat dipenuhi dengan memanfaatkan pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan, seperti mikrohidro (air), tenaga surya, tenaga angin, tenaga sampah dan tenaga biogas, serta pengelolaan air limbah secara terpusat di perkotaan
3. Kegiatan pariwisata di DIY diperkirakan akan berkembang menjadi tujuan wisata unggulan yang didukung oleh meningkatnya jaringan transportasi dan infrastruktur antarwilayah, tersedianya fasilitas dan akomodasi yang lebih beragam serta bermutu. Tersedianya infrastruktur dan fasilitas pendukung obyek dan daya tarik wisata (ODTW) dari semua sektor baik yang difasilitasi pemerintah, swasta maupun masyarakat, dengan titik berat pada peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung ODTW
4. Keberadaan Infrastruktur budaya yang meliputi panggung terbuka, pendopo, gedung pertunjukan, ruang pameran, studio musik, auditorium, laboratorium dan sanggar belum semuanya memenuhi standar minimal internasional.
5. Menyediakan pelayanan sosial dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya pendukung, dengan prioritas penataan ruang yang memadukan jaringan infrastruktur dan pelayanan sosial.

Dari berbagai isu dan capaian kinerja sasaran pembangunan tahun 2020, diperoleh identifikasi terhadap permasalahan pembangunan di DIY sebagai dasar pijakan dalam perencanaan ke depan, yang terangkum sebagai berikut (RKPD DIY 2022):

- 1. Belum Optimalnya Derajat Kualitas Sumberdaya Manusia yang disebabkan oleh:**
  - a) Disparitas IPM antar wilayah;
  - b) Partipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan masih rendah;
  - c) Kualitas pendidikan belum merata;
  - d) Kualitas pelayanan kesehatan belum merata.
- 2. Derajat Ekonomi Masyarakat masih rendah yang disebabkan oleh:**
  - a) Rendahnya pendapatan per kapita;
  - b) Tingginya angka kemiskinan;
  - c) Ketimpangan pendapatan masih tinggi;
  - d) Pertumbuhan ekonomi yang belum berkelanjutan.
- 3. Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah masih tinggi yang disebabkan oleh:**
  - a) Investasi yang belum merata;
  - b) Ketersediaan infrastruktur yang belum merata.
- 4. Layanan Publik Belum Optimal, yang disebabkan oleh masih rendahnya kapasitas tata kelola pemerintahan.**

Secara lebih rinci, permasalahan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dijabarkan, antara lain:

- 1) Pandemi Covid-19 masih tinggi;
- 2) Kualitas pelayanan publik belum sepenuhnya baik;
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi belum optimal;
- 4) Ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota masih tinggi;
- 5) Ketimpangan pendapatan antar individu masih tinggi;
- 6) Angka kemiskinan masih tinggi;
- 7) Daya saing daerah (ekspor luar negeri, investasi) relatif masih rendah;
- 8) Kontribusi sektor dominan (pertanian, industri pengolahan) belum optimal;
- 9) Tingginya konversi lahan pertanian ke non pertanian;
- 10) Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi;

- 11) Daya dukung lingkungan semakin menurun;
- 12) Penyediaan Infrastruktur Kawasan belum optimal;
- 13) Rencana tata ruang dan aktivitas perekonomian belum sesuai;
- 14) Kelembagaan ekonomi desa masih belum optimal;
- 15) Kualitas pendidik dan sarpras sekolah belum merata;
- 16) Minat baca dan budaya literasi masih rendah.

### **3.1.2. Visi dan Misi**

RPJPD DIY 2005-2025 memiliki visi “Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera” dengan Misi:

1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal.
2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

Pada setiap tahapan RPJPD DIY 2005-2025 terdapat Penekanan 5 Tahunan. Penekanan 5 Tahun keempat (Tahun 2020 - 2025) yaitu “Penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi” yang diimplementasikan dalam RPJMD DIY 2017 - 2022.

RPJMD DIY 2017 - 2022 memiliki visi “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” dengan misi:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban.

Melalui misi pertama ini, Pemerintah Daerah DIY, segenap pemangku kepentingan dan masyarakat akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup-kehidupan dan penghidupan sekurangnya dari aspek:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan, akses infrastruktur dasar
  - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan
  - c. Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk halnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan (*Gini Index*), dan menurunkan ketimpangan antar wilayah (*Index williamson*).
  - d. Peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik yang memenuhi rasa aman, nyaman dan tertib bagi seluruh warga.
2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis

Misi kedua tersebut akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan mewujudkan perilaku aparatur sipil negara yang berintegritas. Upaya pewujudan misi kedua sekurangnya dengan:

- a. Melakukan semangat perjumpaan dan silang birokrasi akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui “strategi silang vertikal” (keterbukaan di internal SKPD), “strategi silang horisontal” (keterbukaan antar SKPD), dan “strategi silang heterarki” (gabungan keterbukaan vertikal dan horisontal antar SKPD).
- b. Mendorong semangat “Perjumpaan” dan “Silang Kelembagaan” akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui “silang belajar” ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar lembaga Pemda DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan “Trilogi SDM-DIY” atau “E2-K” yakni: Etos, Etika, dan Kualitas. Etos, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan perubahan persepsi (*mindset*) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan

kantoran, menjadi tugas birokrasi sebagai “karya peradaban”, yang menyandang arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah “karya peradaban”, karena tanpa kontribusi karya pelayanan birokrasi, peradaban di DIY tentu tidak akan berkembang menjadi peradaban seperti yang dapat kita saksikan hari ini. Etika, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan “kemuliaan” dalam pengertian bersatunya “pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia”, dalam rangka menciptakan SDM yang “berintegritas” yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kualitas, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan adanya pergeseran mindset, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsi hanya sebagai “karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran”, melainkan menuju pada pembentukan “sikap” bahwa karya birokrasi DIY adalah “karya yang dapat menjadi rujukan” bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lain di tempat lain (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi “rujukan”, maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang “diniati” untuk menjadi “karya berkualitas tinggi”. Untuk itu, membangun birokrasi dengan “Ruh budaya karya berkualitas tinggi” akan menjadi penting bagi DIY dalam lima tahun ke depan. Ketiga aspek “Trilogi SDM-DIY”, merupakan satu kesatuan yang utuh. Negara Scandinavia dan Jepang adalah contoh negara yang memiliki SDM dengan etos kerja tinggi, etika tinggi dan budaya kualitas tinggi.

### **3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KELITBANGAN DAERAH**

Dalam mewujudkan tujuan dari penyusunan RIK ditetapkan arah kebijakan dan strategi kelitbangan DIY pada Tahun 2022-2027 yang akan menjadi landasan dalam penyusunan program prioritas yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut. Arah kebijakan dan strategi kelitbangan ini untuk menjamin sinergitas pelaksanaan kegiatan kelitbangan di DIY.

### 2.2.1. Arah Kebijakan Kelitbangan

Arah kebijakan merupakan panduan bagi instansi penyelenggara kelitbangan daerah maupun para peneliti di lingkungan Pemda DIY dan OPD pada Pemda DIY dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kelitbangan sehingga berorientasi pada koridor utama kelitbangan dan tujuan utama dari kelitbangan yaitu mendukung inovasi dan pembangunan daerah.

Berdasarkan beberapa dokumen yang menjadi acuan penyusunan Rencana Induk Kelitbangan DIY Tahun 2022-2027 seperti Permendagri Nomor 17 Tahun 2016, RPJPD DIY 2005-2025, RPJMD DIY 2017-2022, Rencana Induk Kelitbangan DIY 2019-2022 maka arah kebijakan kelitbangan DIY periode 2022-2027 sebagai berikut:

1. Meningkatkan dampak/impak dari hasil-hasil kelitbangan baik dalam bentuk perekayasaan teknologi maupun evaluasi kebijakan
2. Mensinergikan jejaring (*networks*) dengan lembaga lain untuk optimalisasi hilirisasi hasil penelitian dengan dunia industri, dan dunia usaha
3. Mengarahkan kegiatan-kegiatan kelitbangan agar berorientasi pada pemecahan masalah (*problem solving*) yang berkembang dan dihadapi oleh masyarakat DIY dalam bentuk kebijakan publik (*public policy*)
4. Meningkatkan penjaminan mutu kinerja kelitbangan daerah dan implementasi hasil-hasil kelitbangan.

### 2.2.2. Strategi Kelitbangan

Strategi kelitbangan adalah cara-cara yang ditempuh untuk mewujudkan arah kebijakan dalam kelitbangan daerah, adapun strategi yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan kerangka regulasi dan penyiapan SDM kelitbangan serta meningkatkan evaluasi hasil-hasil riset yang berorientasi pada *impact-based research*:
  - a. Mendorong regulasi yang dapat meningkatkan iklim kelitbangan berbasis dampak riset untuk dunia industri

- b. Mendorong peningkatan kualitas SDM bidang kelitbangan
- c. Melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil kelitbangan
- 2. Menyiapkan forum sinergi pentahelix untuk mengawal pelaksanaan, hasil dan dampak kelitbangan yang berorientasi pada:
  - a. Memperkuat kolaborasi kelitbangan antar Lembaga secara berkelanjutan
  - b. Hilirisasi hasil riset dengan dunia industri dan dunia usaha
  - c. Mensinergikan dampak hilirasi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat
- 3. Mendorong penguatan dan perumusan alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) yang berkembang dan dihadapi oleh masyarakat DIY dalam bentuk kebijakan publik (*public policy*)
  - a. Mendorong pengembangan kelitbangan di daerah yang berfokus pada penyelesaian di masrakat.
  - b. Mendorong pengembangan kelitbangan di daerah yang berfokus untuk mendukung perumusan kebijakan publik
- 4. Meningkatkan tata Kelola kelitbangan daerah
  - a. Meningkatkan penjaminan mutu untuk meningktkan kinerja kelitbangan.
  - b. Meningkatkan akuntabilitas dan kompetensi kelitbangan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja kelitbangan daerah.
  - c. Meningkatkan fasilitasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan

### **3.3.INDIKASI PROGRAM PRIORITAS KELITBANGAN DAERAH**

#### **2.3.1. Program Prioritas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Acuan arah kelitbangan bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik didasarkan pada dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu RPJPD DIY Tahun 2005 -2025, RPJMD DIY Tahun 2017 – 2022, RKPD DIY Tahun 2022 dan Rencana Strategis (Renstra) periode 2017-2022 dari OPD terkait

langsung dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Secara lebih detail program prioritas kelitabangan termaksud adalah sebagai berikut (Tabel 3.1).

1. Peningkatan pembinaan ideologi Pancasila dan penegakan Perda
2. Penumbuhan *Digital Government* dalam *Smart Village* Keistimewaan
3. Penumbuhan *Big Data*, Integrasi Data, *Sharing Data*, *Open Data*, untuk *Smart Government*
4. Pengembangan *e-service* dan reformasi birokrasi

Tabel 3.1. Tema Kelitbangan Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	OPD	Isu Bidang	Tema Kelitbangan
Belum optimalnya dampak riset terhadap masyarakat	Meningkatkan dampak/impact dari hasil-hasil kelitbangan baik dalam bentuk perекayasaan teknologi maupun evaluasi kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan tata Kelola kelitbangan daerah                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan penjaminan mutu untuk meningkatkan kinerja kelitbangan.</li> </ol> </li> <li>2. Meningkatkan akuntabilitas dan kompetensi kelitbangan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja</li> </ol>	Kesbangpol Satpol PP	Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Penegakan Perda	Kepemiluan 2024 Pembinaan Ideologi Pancasila Pada Level Keluarga, Sekolah, Lembaga Keagamaan, Ormas. Perkantoran  Intoleransi Dan Kerawanan Social Dalam Dinamika Keormasan  <i>Collaborative Governance</i> Dengan Masyarakat Sipil.  Ketahanan Ekonomi Dan Social Dalam Ketahanan Nasional Pasca Covid  Media Social Dan Ketahanan Nasional  Penegakan Peraturan Daerah Berbasis Digital Law Enforcement

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	OPD	Isu Bidang	Tema Kelitbang
Belum optimalnya dampak riset terhadap masyarakat	Meningkatkan dampak/impact dari hasil-hasil kelitbang baik dalam bentuk per kayakasaan teknologi maupun evaluasi kebijakan	<p>3. Meningkatkan tata Kelola kelitbang daerah</p> <p>b. Meningkatkan penjaminan mutu untuk meningkatkan kinerja kelitbang.</p> <p>c. Meningkatkan akuntabilitas dan kompetensi kelitbang dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja kelitbang daerah.</p> <p>d. Meningkatkan fasilitas dan diseminasi hasil-hasil kelitbang</p>	Pani Radya Keistimewaan Biro Hukum Biro Tata Pemerintahan	Penumbuhan Digital Government dalam Smart Village Keistimewaan	<p>Smart Kalurahan, Smart Kelurahan Dalam Keistimewaan DIY.</p> <p>Hak Dasar Dan Fasilitas Pemberian NIK Dalam Isu Pemberian Fasilitas Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Admindak / Marginal</p> <p>Teknologi Informasi Dalam Data Kependudukan Yang Akurat Berbasis NIK</p> <p>Keterbukaan Informasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Digital</p> <p>Pemanfaatan Satu Data Dalam Penanganan Kemiskinan Berbasis Perencanaan Terpadu</p>

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	OPD	Isu Bidang	Tema Kelembangan
Belum optimalnya kerjasama antar kelibangan antar OPD	1. Meningkatkan perjaminan mutu kinerja kelibangan daerah dan implementasi hasil-hasil kelibangan	2. Meningkatkan tata Kelola kelibangan daerah a. Meningkatkan perjaminan mutu untuk meningkatkan kinerja kelibangan. b. Meningkatkan akuntabilitas dan kompetensi kelibangan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja kelibangan daerah. c. Meningkatkan fasilitasi dan diseminasi hasil-hasil kelibangan	Bappeda BPKAD Dinas Komunikasi dan Informasi Dinas Perumahan dan Tata Ruang Badan Pepustakaan dan Arsip Daerah	Penumbuhan Big Data, Integrasi Data, Sharing Data, Open Data, untuk Smart Government	Peningkatan Kapasitas <i>E-Planning</i> Pemerintah dalam Kajian Agile Government  Peningkatan Kapasitas <i>E-Public Service</i> dalam Kajian Agile Government  <i>Digital Policy</i> dan <i>Big Data</i> dalam <i>Open Government</i>  Penguatan Evidence Based Policy Dalam Pemerintahan Pasca Pandemi  E-Money Dan Kontrol Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan  <i>Smart City, Smart Society</i> dalam Pembangunan Berkelanjutan  <i>Smart Tourism</i> Dalam Meningkatkan Kualitas Wisata Dalam Masa Pandemi

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	OPD	Isu Bidang	Tema Kelitbangan
Belum optimalnya dampak riset terhadap masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mensinergikan jejaring (networks) dengan lembaga lain untuk optimalisasi hilirisasi hasil penelitian dengan dunia industri, dan dunia usaha</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan forum sinergi pentahelix untuk mengawal pelaksanaan, hasil dan dampak kelitbangan yang berorientasi pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat kolaborasi kelitbangan antar Lembaga secara berkelanjutan</li> <li>Hilirisasi hasil riset dengan dunia industry dan dunia usaha</li> <li>Mensinergikan dampak hilirisasi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat</li> </ol> </li> </ol>	BPBD	Pengembangan e-services	<p><i>Digital Public Services Dan Virtual Government Assistance Dalam Pentahelix Perspective</i></p> <p>Kajian Resiko Multi Resiko Penanganan Covid Dan Pemulihan Ekonomi</p> <p>Ancaman Erupsi Merapi dalam Kajian Pengurangan Resiko Bencana</p> <p>Ancaman Hidrometrologi dalam Kajian Pengurangan Resiko Bencana</p> <p>Ancaman Bencana Longsor dalam Kajian Pengurangan Resiko Bencana</p> <p>Perubahan Iklim Dan Tantangan Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Kota.</p>

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	OPD	Isu Bidang	Tema Kelitbangan
Belum optimalnya dampak riset terhadap masyarakat	2. Mengarahkan kegiatan-kegiatan kelitbangan agar berorientasi pada pemecahan masalah ( <i>problem solving</i> ) yang berkembang dan dihadapi oleh masyarakat DIY dalam bentuk kebijakan publik ( <i>public policy</i> ) dalam bidang ekonomi, sarana prasarana / infrastruktur, pemerintahan dan tata kelola	2. Mendorong penguatan dan perumusan alternatif pemecahan masalah ( <i>problem solving</i> ) yang berkembang dan dihadapi oleh masyarakat DIY dalam bentuk kebijakan publik ( <i>public policy</i> ) a. Mendorong pengembangan kelitbangan di daerah yang berfokus pada penyelesaian di masyarakat. b. Mendorong pengembangan kelitbangan di daerah yang berfokus untuk mendukung perumusan kebijakan publik	BKD Inspektorat Biro Organisasi	Reformasi Birokrasi	Penguatan Birokrasi Menuju <i>Dynamic Governance</i> dalam Reformasi Birokrasi  <i>Web- Based Application</i> dalam Pengelolaan Manajemen Kepegawaian ASN  Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui <i>E-Mentoring</i>  <i>Merit System</i> Dalam Manajemen SDM  Pengembangan Pola Karir dan Sistem Kinerja ASN yang Berkeadilan

Sumber: Hasil Wawancara, FGD dan Studi Pustaka (2021)

### 3.3.2. Program Prioritas Bidang Sosial-Budaya

Program prioritas ini terdiri dari beberapa isu bidang yang kemudian dirinci menjadi beberapa tema kelitbangan. Beberapa isu bidang ini merupakan turunan dari kebijakan.

#### 3.0.1.1. Bidang Budaya

Strategi ketahanan, konservasi dan pemajuan budaya memiliki beberapa isu bidang yang tema di dalamnya dapat dikerjakan untuk lima tahun ke depan (2022-2027). Kelima isu bidang itu adalah: 1) Penguatan Multikulturalisme, 2) Pelestarian Sejarah dan Warisan Budaya, 3) Pengembangan Industri Budaya, 4) Pengembangan SDM & Pranata Kebudayaan di Era Pandemi, dan 5) Pengembangan Sarana dan Prasarana Budaya. Masing-masing isu bidang akan dijabarkan ke dalam satu atau beberapa tema kelitbangan.

##### 1. Penguatan Multikulturalisme

Isu bidang pertama, yaitu penguatan multikulturalisme, diwujudkan dengan tema kelitbangan tentang penyusunan model inklusi interkultural pada masyarakat Yogyakarta. Hal ini diperlukan karena kehadiran aneka mahasiswa yang belajar di beberapa kampus secara historis pernah mengakibatkan adanya pertikaian baik di antara mereka, demonstrasi politis maupun dengan mahasiswa lain berbeda daerah. Peristiwa di Babarsari, Jl. Kusumanegara, Maguwoharjo, Condongcatur serta tempat lain membuat Yogyakarta yang mengangkat diri sebagai kota toleran menjadi ternodai. Penolakan warga setempat terhadap mahasiswa dari etnis dan daerah tertentu juga terjadi di berbagai lokasi. Oleh karena itu tema kelitbangan mengenai model inklusi intercultural perlu ditemukan agar menjadi panduan dalam menjaga kohesi sosial dengan memediasi mahasiswa antardaerah bergaul secara inklusif. Keberadaan masyarakat multikultural-kohesif akan menjadi daya dukung sebagai Kota Pelajar, Budaya dan Pariwisata.

## 2. Pelestarian Sejarah dan Warisan Budaya

Isu bidang kedua yaitu Pelestarian Sejarah dan Warisan Budaya. Isu bidang ini dijabarkan ke dalam beberapa tema kelitbangan, yaitu: 1) Pemetaan degradasi penguasaan bahasa Jawa dan aneka upaya pencegahannya, 2) Signifikansi hilirisasi kajian teks sastra dan budaya keraton ke berbagai komunitas dan pelaku budaya, dan 3) urgensi pendidikan keyogyakartaan bagi generasi milenial dalam menghadapi interaksi lintas-budaya dan antargenerasi di era 4.0.

Tema pertama berfokus pada penelitian tentang penurunan penguasaan Bahasa Jawa, baik *ngoko*, *krama madya* maupun *krama inggil* di kalangan anak-anak. Terdapat dugaan fenomena yang harus didalami melalui penelitian bahwa ada kecenderungan kemampuan berbahasa Jawa *Krama Inggil* yang *standard* tidak lagi dimiliki oleh generasi X dan Y karena penggunaan Bahasa Indonesia dan *Basa Ngoko* lebih mengemuka dalam pergaulan sehari-hari. Kalau pun mereka menggunakan *Basa Krama Inggil*, kemampuan mereka belum mencapai *standard* minimal. Pernikahan lintas-etnis dan kehidupan di perumahan yang bermunculan di DIY, terutama di perkotaan dan pinggiran kota, memunculkan kecenderungan untuk menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar karena lebih menghargai keragaman budaya dan memudahkan dalam berkomunikasi. Sementara itu di antara keluarga muda di perkotaan dan pinggiran kota muncul gejala untuk berkomunikasi mereka dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Ada dugaan bahwa mereka merasa lebih “maju” bila menggunakan Bahasa Indonesia, dan merasa “tradisional” bisa menggunakan Bahasa Jawa.

Fenomena itu secara keseluruhan menurunkan kemampuan berbahasa Jawa yang merupakan bukan hanya menjadi kekhasan DIY sebagai daerah yang memiliki Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang merupakan keraton Jawa, menjadi ciri khas budaya yang menjadi salah satu pembangun suasana wisata khas

Yogyakarta, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk mendalami kesenian, kebudayaan dan filosofi Jawa di DIY yang merupakan Daerah Istimewa yang tumbuh dari Budaya Jawa. Oleh karena itu, penelitian akan memberikan hasil yang bisa dipercaya apakah dugaan fenomena itu sungguh terjadi massif atautkah tidak dan di mana saja fenomena itu benar, komunitas seperti apakah pelakuknya, apakah dampak kultural ke depan bagi keberadaan kebudayaan Jawa dan bagaimanakah cara mengatasinya sekaligus sebagai bagian untuk melakukan konservasi warisan Bahasa Jawa sebagai pintu masuk untuk memahami dan mendalami kebudayaan Jawa agar menjadi lestari.

Tema kedua berkaitan dengan signifikansi hilirisasi kajian teks sastra dan budaya keraton ke berbagai komunitas dan pelaku budaya. Hal ini terinspirasi oleh pameran yang diselenggarakan pada Maret 2019 yang lalu dengan tema ‘Merangkai Jejak Peradaban Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat’. Pameran Naskah Keraton Yogyakarta menampilkan 24 koleksi manuskrip asli dan 75 koleksi yang berhasil didigitalisasi dari British Library di Inggris. Sebanyak 75 manuskrip dan arsip yang merekam catatan sejarah Keraton Yogyakarta tersebut hilang pada era Sri Sultan Hamengku Buwono II sebab direbut oleh pasukan Inggris pada tahun 1812. Ketua panitia Gusti Kanjeng Ratu Bendara menyampaikan, pameran ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan merajut kembali sejarah Kasultanan Yogyakarta. *“Ini menjadi tantangan utama bagi Keraton Yogyakarta agar melestarikan dan memicu generasi muda untuk tergerak menghidupkan dan menjiwai perilaku Jawa yang sesungguhnya. Perilaku yang penuh dengan budi pekerti luhur diharapkan dapat menjadi pedoman perilaku bangsa Indonesia,”* ujar putri bungsu Sultan, GKR Bendara. Sementara itu Sri Sultan HB X menuturkan, *“Agar seluruh elemen keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta senantiasa diberkahi semangat golong-gilig nyawiji guna menyambut*

*tercapainya peradaban Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai Keraton Milenial bagi generasi baru bangsa dan semesta.”<sup>1</sup>*

Frase “*generasi muda bergerak untuk menghidupkan dan menjiwai perilaku Jawa yang sesungguhnya*” inilah yang menjadi “kunci” agenda ke depan agar “keraton milenial” bagi generasi baru bangsa dapat diwujudkan. Untuk itu penelitian tentang peluang, tantangan dan potensi yang dimiliki oleh generasi muda dalam mempelajari aneka teks, sastra, sejarah dan budaya keraton sebagai ciri khas keistimewaan DIY dipandang relevan untuk dilakukan agar kebijakan ke depan dalam bidang kebudayaan yang mempertautkan kekayaan seni-budaya keraton dan dunia kehidupan (*world view*) generasi milenial dapat memperoleh pijakan bukti empirisnya (*evidence-based policy*). Dari penelitian umum tentang tanggapan generasi muda tersebut, penelitian ini mengerucut pada arti penting (signifikansi) hilirisasi kajian teks sastra dan budaya keraton ke berbagai komunitas dan pelaku budaya agar menjadi inspirasi mereka dalam berkarya, turut memasyarakatkan budaya Jawa dan sejarah keraton, serta mendukung upaya pewujudan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai “keraton milenial” berbasis budaya Jawa yang berbudi pekerti luhur.

Tema ketiga, yaitu urgensi pendidikan keyogyakartaan bagi generasi milenial dalam menghadapi interaksi lintas-budaya dan antargenerasi di era 4.0, bermaksud untuk mengetahui apakah pendidikan keyogyakartaan perlu dan mendesak untuk diterapkan sebagai muatan lokal pendidikan kultural agar generasi milenial memiliki pemahaman tentang keyogyakartaan secara utuh sehingga kemudian mereka bergerak untuk terus memahami secara mendalam, menginternalisasi pemahaman ke dalam diri dan menjiwai praktik kehidupan mereka sebagai generasi milenial Yogyakarta yang bersendikan semangat nilai

<sup>1</sup> BAB 1 Baca: “Pameran Naskah Keraton Wujudkan Keraton Milenial”, [https://www.jogjaprovo.go.id/berita/detail/7566-pameran-naskah-keraton-wujudkan-keraton-milenial/diakses 29/9/2021/09.00 WIB](https://www.jogjaprovo.go.id/berita/detail/7566-pameran-naskah-keraton-wujudkan-keraton-milenial/diakses%2029/9/2021/09.00%20WIB).

yang tertuang pada UU Keistimewaan DIY. Hal ini dipandang penting karena generasi milenial menggunakan media sosial dan aneka akses internet dalam berinteraksi sosio-kultural dengan aneka budaya secara mondial setiap hari. Isi interaksi akan menentukan pemahaman mereka akan kehidupan sehingga bisa saja mereka menjadi generasi yang apresiatif terhadap nilai dan tampilan budaya luar tetapi justru tidak mengetahui pijakan nilai di mana mereka hidup.

Untuk menyertai proses mereka bertumbuh membentuk sosok dewasa yang diinginkan maka penelitian ini penting untuk dilakukan untuk memetakan apakah mereka mengetahui nilai-nilai pokok keyogyakartaan dan bagaimana sikap mereka atas nilai-nilai tersebut. Kita tidak berharap kesenjangan kultural antargenerasi akan terjadi karena generasi milenial dan generasi sebelumnya mengonsumsi informasi yang berbeda, memiliki konsep diri berbeda, dan sikap terhadap nilai-nilai keyogyakartaan berbeda pula sehingga di masa datang akan terjadi keterputusan sistem nilai meskipun sama-sama tinggal di DIY. Bila satu generasi saja terputus maka bisa saja di masa datang warga DIY memang tinggal di DIY tetapi mereka tidak menghayati nilai-nilai keyogyakartaan sebagaimana tertera pada UU Keistimewaan DIY.

Pada titik inilah, generasi mendatang akan mengalami “ketercerabutan akar sistem nilai” sehingga Yogyakarta akan menjadi kota tanpa karakter keyogyakartaan pada diri para penduduknya. Untuk itu, penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi mengenai sistem nilai yang berada pada diri generasi milenial dan apakah nilai-nilai keyogyakartaan perlu untuk disosialisasikan agar antargenerasi tidak mengalami keterputusan sistem nilai. Ki Hajar Dewantara perlu menjadi inspirasi kita bahwa kita bisa belajar dari mana pun dan berinteraksi dengan budaya mana pun tetapi jangan sampai kita

kehilangan jati diri kita yang berbasis pada akar budaya dan sejarah kita sendiri. Kita mengolah kebaikan, keunggulan dan kemanfaatan budaya dan nilai dari luar dengan berdasar pada nilai dan budaya sendiri. Dengan demikian, kita tidak stagnan, tetapi tetap berkembang, dengan tanpa kehilangan akar jati diri pada sistem nilai dan budaya leluhur.

### 3. Pengembangan Industri Budaya

Isu bidang ketiga, yaitu Pengembangan Industri Budaya, dijabarkan ke dalam tema kelitbangan: Peta, peran, dan dampak *local hero* dalam pemajuan industri budaya di kalangan milenial. Tema ini akan didalami melalui suatu penelitian mengenai “pahlawan lokal” (“*local hero*”) dalam bidang pemajuan industry budaya. Penelitian akan memetakan “pahlawan lokal” ini berada di mana saja di DIY: tempat tinggal, posisi sanggar/kantor, lokasi kegiatan, siapa saja yang mendukung upaya mereka dalam berkarya dan cakupan kegiatan yang dilakukan: lokal, regional, nasional, internasional. Mereka juga akan didalami peran yang mereka lakukan dalam pemajuan industri budaya: penyiapan SDM, produksi gagasan, pementasan, pengelolaan dan perluasan jaringan, *fund rising*, dokumentasi, promosi, dan sebagainya. Melalui aneka peran itu, apakah dampaknya terhadap pemajuan budaya DIY, partisipasi kalangan milenial, regenerasi pelaku seni-budaya, kesejahteraan seniman-budayawan, daya tarik DIY sebagai salah satu tujuan wisata budaya, dan sebagainya.

### 4. Pengembangan SDM dan Pranata Kebudayaan di Era Pandemi

Isu bidang keempat ini akan tertuju pada kehidupan para seniman dan budayawan terdampak pandemi. Tema kelitbangan yang diangkat pada isu bidang ini adalah **pemetaan dampak pandemi terhadap kehidupan dan keberlanjutan proses kreatif para seniman**. Hal ini didasarkan pada kelihan para seniman dan budayawan bahwa selama pandemi mereka tidak bisa menyelenggarakan pertunjukan sehingga berdampak pada dugaan turunnya kreativitas (karena tidak ada petunjuk) dan

dukungan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, apakah dugaan itu benar, sebagaimana disampaikan pada berita media massa, informasi media sosial dan warta interpersonal, maka hal ini perlu didalami melalui sebuah penelitian. Para seniman ini memiliki aneka simpul jaringan sehingga melalui aneka simpul ini penelitian dapat dilakukan untuk pengumpulan data. Hasil penelitian dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan terhadap keadaan para seniman dan budayawan ini. Keberadaan mereka sungguh penting bagi keberadaan DIY sebagai tujuan wisata dan kota budaya.

#### 5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Budaya

Isu bidang kelima ini akan diturunkan ke dalam tema kelitbang: Pemetaan kelayakan aneka sarana dan prasarana budaya di DIY. Gagasan ini didasarkan pada realita bahwa selama masa Pandemi *Covid-19* menerpa maka aneka kerumunan sosial dilarang untuk mencegah penularan virus. Oleh karena itu pentas pertunjukan publik pun tidak mungkin dilakukan, kecuali secara daring dan sangat terbatas. Dengan demikian, sarana dan prasarana seni-budaya menjadi nyaris tidak digunakan atau sangat minim sehingga perlu pengecekan terhadap kemungkinan tidak terurus, kotor, rusak dan sebagainya yang perlu untuk dipetakan agar perawatan dapat dilakukan sesuai dengan data lapangan. Namun pada sisi lain, pandemi ini mendorong kita untuk secara kreatif mengembangkan aneka sarana dan prasarana tersebut sesuai dengan kebutuhan para pelaku seni-budaya. Oleh karena itu, selain melakukan pemetaan kelayakan terhadap aneka sarana dan prasarana budaya yang sudah ada, penelitian ini juga memetakan kebutuhan sarana dan prasarana apa sajakah yang mereka perlukan untuk meneruskan proses kreatif selama masa pandemi belum berakhir. Hasil penelitian ini akan memberikan informasi apa saja dan di mana sarana-prasarana budaya yang perlu diperbaiki, dirawat dan dikelola secara tepat pada masa pandemi, serta kebutuhan sarana dan prasarana apa sajakah

yang diperlukan bagi para seniman dan budayawan untuk dapat terus berkarya selama pandemi masih menerpa. Dengan demikian, kebijakan pada aspek kebudayaan ini dapat mendukung proses pemajuan kebudayaan oleh para pelaku tersebut dengan memberikan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

### 3.3.2.2. Bidang Kesehatan

#### 1. Kurangnya deteksi penyakit medis dan nonmedis

Isu bidang ini dijabarkan ke dalam tema kelitbang: 1) Pemanjangan layanan kesehatan masyarakat, dan 2) Peluang kesehatan preventif berbasis pentahelix untuk mendeteksi penyakit medis dan non medis. Tema pertama berkaitan dengan penelitian terhadap klinik, puskesmas dan rumah sakit dalam memberikan layanan Kesehatan terhadap masyarakat. Layanan ini meliputi bukan hanya kualitas dan efektifitas pelayanan dalam menyembuhkan penyakit tetapi juga untuk mengetahui penyakit apa sajakah yang sedang melanda masyarakat dan bagaimanakah deteksi tenaga medis dan paramedis terhadap kemunculan penyakit itu. Berdasarkan data tersebut maka kebijakan dapat dirumuskan untuk memandu langkah antisipatif yang harus dilakukan agar sebaran penyakit tersebut bisa diatasi dengan efektif.

Tema kedua berkaitan dengan peluang DIY untuk menginisiasi upaya kesehatan preventif untuk menempatkan seorang tenaga medis pada komunitas yang memiliki kerentanan karena pola hunian (perkampungan rapat, slums), posisi geografis (daerah perbatasan yang jauh dari layanan kesehatan, kawasan pinggir sungai, kawasan pinggir rel kereta api), kelas ekonomi (kawasan berpenduduk dengan tingkat kemiskinan tinggi), kawasan rawan bencana alam (longsor atau vulkanik) dan kawasan di mana banyak lansia yang tidak terurus keluarga inti karena migrasi atau telah meninggal dunia. Penelitian ini dilakukan untuk menjajagi apakah generasi muda terutama dari kalangan miskin bersedia menjadi tenaga medis untuk secara

preventif menjaga suatu komunitas tetap sehat dengan secara aktif memeriksa kualitas kesehatan, kondisi kesehatan rumah dan kawasan hunia, pola hidup sehat dan pengetahuan akan kesehatan mereka sehingga mereka tidak sakit.

Para tenaga medis ini tidak boleh melakukan pekerjaan lain selain menjaga kesehatan komunitas di mana mereka ditempatkan sampai mereka pensiun. Mereka akan menjadi anggota komunitas itu. Selama pendidikan mereka diberi beasiswa penuh, ditempatkan sebagai ASN Dinas Kesehatan DIY, memperoleh fasilitas hidup yang memadai dan diberi kewenangan penuh dalam mengelola komunitas agar kesehatan terjamin. Penelitian akan mengumpulkan data sejumlah universitas yang memiliki fakultas kedokteran untuk mengetahui apakah mereka mau memberikan beasiswa penuh kepada generasi muda dari kalangan kurang mampu tetapi memiliki potensi akademik bagus untuk menjadi dokter komunitas. Penelitian juga akan mengumpulkan data peluang CSR berbagai korporasi atau dunia usaha di DIY untuk berkontribusi pada program ini. Hal sama juga dilakukan kepada pemerintah DIY apakah memiliki kesamaan orientasi kebijakan, sumberdaya, jaringan dan komitmen untuk menginisiasi program dokter komunitas ini sebagai bagian dari keistimewaan DIY dalam menerapkan kesehatan preventif, bukan kuratif.

Penelitian juga bisa ditujukan kepada NGO/LSM serta lembaga *funding* yang berkomitmen terhadap layanan kesehatan gratis terhadap komunitas rentan seperti ini dalam rangka mewujudkan kesehatan preventif di DIY. Kerjasama antara masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah daerah, korporasi/ dunia usaha dan lembaga donor (berserta mitra NGO/LSM) inilah yang akan menjadi penopang keberhasilan gagasan ini. Gagasan ini menjadi urgen dengan adanya pandemi Covid-19 yang tidak terantisipasi secara tepat dan mereka yang terdampak tidak secara cepat serta tepat tertangani karena tenaga medis

dan paramedis telah terlalu besar beban layanan (*overload*) yang harus dilakukan. Penelitian akan mendalami peluang gagasan ini dengan mengumpulkan data dari kelima pihak tersebut. Hasil penelitian akan menjadi masukan bagi kebijakan di bidang kesehatan, terutama kesehatan preventif.

## 2. Gerakan Sehat Lestari belum optimal

Hal ini sebenarnya meneruskan isu bidang yang telah dituangkan pada RIK Kelitbang 2017-2022 namun karena relevansinya maka isu bidang ini dinilai perlu untuk diteruskan agar Gerakan Sehat Lestari sungguh menjadi kesadaran warga dalam memahami, menyadari dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Besaran korban dan sebaran Pandemi Covid-19 di DIY menandakan bahwa gerakan ini belum bisa mendorong masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip kesehatan, termasuk protokol kesehatan yang menjadi pijakan warga dalam berinteraksi satu sama lain di masyarakat. Namun apakah memang demikian yang sungguh terjadi maka isu bidang ini dijabarkan ke dalam tema Optimalisasi sadar sehat: pembinaan masyarakat melalui gerakan “Jogja Sehat Lestari”. Apakah gerakan ini telah optimal dilakukan, justru ketika pandemi telah dan tengah melanda DIY, untuk menemukan hasil penelitian apakah gerakan ini telah sungguh optimal dan apakah rekomendasi yang perlu disampaikan untuk perbaikan kebijakan ke depan.

## 3. Angka penyakit tidak menular tinggi

Berdasarkan diskusi dengan wakil Dinas Kesehatan DIY, isu yang urgen untuk direspon dalam bentuk penelitian adalah tingginya angka penyakit tidak menular di DIY, bahkan penyakit tidak menular ini, yaitu hipertensi, asma, jantung, kanker, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), menduduki peringkat nomor 1 di Indonesia. Oleh karena itu, isu bidang itu dituangkan ke dalam tema kelitbang ini: Pemetaan lokasi, penderita, penyebab dan efektivitas penanganan penyakit tidak menular di DIY. Penelitian

dengan tema ini akan memetakan lokasi penderita kesemua penyakit tidak menular itu di DIY, menghitung jumlah dan menggambarkan profil penderita, mendalami mengapa penderita mengalami penyakit tersebut, meneliti apa dan bagaimana penanganan terhadap kesemua penyakit itu, dan apakah pilihan dan cara penanganan itu telah efektif atau belum karena nyatanya DIY masih menduduki peringkat 1 di Indonesia. Hasil penelitian akan memberikan rekomendasi kebijakan apa yang perlu dilakukan agar jumlah penderita di DIY turun pada tahun mendatang.

4. Tingginya pernikahan dini berpengaruh terhadap *stunting*  
Isu bidang ini akan dituangkan ke dalam tema kelitbang: Efektivitas kerjasama koordinatif dalam promosi kesehatan di kalangan remaja sebagai bagian upaya pencegahan gizi buruk (*stunting*). Akar permasalahan *stunting* adalah pernikahan dini. Penyadaran terhadap para remaja agar tidak melakukan pernikahan usia dini perlu dilakukan oleh berbagai dinas (kesehatan, pendidikan), kantor kementerian agama, pemerintah desa, media massa, LSM/NGO dan BKKBN secara koordinatif. Untuk itu, penelitian terhadap efektivitas kerjasama koordinatif terhadap berbagai pihak itu dalam rangka penyadaran terhadap para remaja agar tidak melakukan pernikahan usia dini perlu dilakukan. Hasil penelitian akan menjadi rekomendasi kebijakan lintas sectoral dengan menyertakan para pihak di luar pemerintahan.

### 3.3.2.3. Bidang Sosial

Bidang ini memiliki dua isu, yaitu 1) Bencana Sosial Akibat Pandemi Covid-19 belum usai, dan 2) Optimalisasi DIY Ramah Difabel: sekolah inklusi dan inklusi sosial belum optimal.

1. Bencana Sosial Akibat Pandemi *Covid-19* belum usai

Isu bidang ini terbagi ke dalam dua tema kelitbang, yaitu: 1) Tingkat Kerelawanan dan Jiwa Sosial Warga DIY selama Era Pandemi Covid-19, serta 2) Tingkat Ketepatan Distribusi

Bantuan Sosial selama Pandemi Covid-19. Bencana sosial ternyata berdampak positif, yaitu munculnya fenomena kerelawanan sosial di DIY, sebagaimana juga terjadi pada propinsi lain. Namun apakah hal itu benar menjadi hal yang sungguh dominan terjadi di DIY, ataukah itu hanya aksi sporadis yang terekam media massa dan media sosial semata. Untuk itu, penelitian diperlukan untuk mencari temuan yang bisa dipertanggung-jawabkan sehingga bisa menjadi masukan kebijakan di bidang sosial ke depan. Di hadapan keterbatasan dukungan pendanaan APBD, kerelawanan dan jiwa sosial dapat menjadi kontributor positif bagi penyelesaian masalah sosial. Peran serta masyarakat akan memperoleh basis akademiknya dalam hal kerelawanan sosial mereka bila hasil penelitian memang menyatakan demikian. Penelitian lain yang bertautan dengan isu ini adalah ketepatan distribusi bantuan sosial di masyarakat. Banyak keluhan muncul berkenaan dengan hal ini. Salah satu biro di pemerintah DIY juga tengah melakukan pendataan jumlah penerima bantuan sosial sesuai dengan kriteria yang secara resmi ditentukan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjadi upaya komplementer terhadap penelitian lain yang terkait tersebut. Ada harapan bahwa kita akan memiliki data penerima bantuan sosial yang terupdate melalui sebuah penelitian, tetapi kita juga memiliki hasil riset evaluatif terhadap implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial kepada warga masyarakat terdampak pandemi. Keduanya akan menjadi masukan bagi kebijakan ke depan tentang pemberian bantuan sosial.

2. Optimalisasi DIY Ramah Difabel: sekolah inklusi dan inklusi sosial belum optimal

Isu bidang ini dituangkan ke dalam dua tema kelitbang: 1) Koordinasi lintas sektoral terhadap kesiapan DIY sebagai daerah inklusi (RAD Difabel), dan 2) Signifikansi “rebranding” bagi SLB di DIY untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap kaum

difabel. Kedua tema ini dihasilkan dalam diskusi dengan wakil Dinas Sosial dalam konfirmasi dan perbaikan penulisan RIK ini. Sejak tahun 2016, Pemerintah DIY telah mencanangkan DIY sebagai daerah inklusi, termasuk ramah difabel. Kedua tema itu dimaksudkan untuk melakukan kajian kebijakan: apakah memang kebijakan itu telah terimplementasikan dengan baik dengan melakukan kerjasama lintas-sektoral, ataukah ada masukan untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan mendatang. Tema itu akan menyusuri data dalam hal koordinasi lintas-sektoral dan sekaligus mencari jalan keluar terhadap sekolah inklusi yang dinilai masih menghadapi berbagai kelemahan dan kendala. Untuk itu, apakah konsep “rebranding” terhadap SLB bisa menjadi alternatif layanan bagi kalangan difabel agar kualitas pendidikan yang diterima bisa lebih baik. Komparasi antara konsep SLB “rebranding” ini dengan “sekolah inklusi” akan didalami di lapangan melalui penelitian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam rangka mendukung kebijakan DIY sebagai daerah inklusi.

**Tabel 3.2. Tema Kelitbangan Bidang Sosial-Budaya**

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Isu Bidang	Tema Kelitbangan	OPD
Keberadaan BRIDA peluang terwujudnya konektivitas dan sinergisitas riset di daerah menjadi lebih besar	Peningkatan dampak hasil kelitbangan baik perekayasaan teknologi maupun evaluasi kebijakan	Meningkatkan adopsi regulasi terhadap hasil kelitbangan untuk konservasi, ketahanan dan kemajuan budaya	Penguatan Multikulturalisme  Pelestarian Sejarah dan Warisan Budaya  Pengembangan Industri Budaya  Pengembangan SDM & Pranata Kebudayaan di Era Pandemi  Pengembangan Sarana Dan Prasarana Budaya	Model inklusi inter-kultural pada masyarakat Yogyakarta  Pemetaan degradasi penguasaan bahasa Jawa dan aneka upaya pencegahannya  Signifikasi hilirisasi kajian teks sastra dan budaya keraton ke berbagai komunitas dan pelaku budaya  Urgensi pendidikan keyogyakartaan bagi generasi milenial dalam menghadapi interaksi lintas-budaya dan antargenerasi di era 4.0  Peta, peran, dan dampak <i>local hero</i> dalam kemajuan industri budaya di kalangan milenial  Pemetaan dampak pandemi terhadap kehidupan dan keberlanjutan proses kreatif para seniman  Pemetaan kelayakan aneka sarana dan prasarana budaya di DIY	Dinas Kebudayaan  Bekerjasama dengan Dispora

<p>Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah untuk kepentingan masyarakat dan dunia industri</p>	<p>Peningkatan dampak hasil-hasil kelibangan baik perekayasa teknologi maupun evaluasi kebijakan</p>	<p>Meningkatkan regulasi yang dapat mewujudkan iklim kelitbang berbasis dampak riset untuk meningkatkan kesehatan masyarakat</p>	<p>Kurangnya deteksi penyakit medis dan nonmedis</p> <p>Gerakan Sehat Lestari belum optimal</p> <p>Angka penyakit tidak menular tinggi (no 1 Indonesia): hipertensi, asma, jantung. kanker, ODGJ</p> <p>Akar permasalahan, upaya pengurangan, pengaruh pernikahan dini terhadap <i>stunting</i></p>	<p>Pemantapan layanan kesehatan masyarakat</p> <p>Peluang kesehatan preventif berbasis triplehelix untuk mendeteksi penyakit medis dan non medis</p> <p>Optimalisasi sadar sehat: pembinaan masyarakat melalui gerakan "Jogja Sehat Lestari".</p> <p>Pemetaan lokasi, penderita dan efektivitas penanganan penyakit tidak menular di DIY</p> <p>Efektivitas kerjasama koordinatif dalam promosi kesehatan di kalangan remaja sebagai bagian upaya pencegahan gizi buruk (<i>stunting</i>)</p>	<p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas Kesehatan, Perekonomian, Pendidikan, Kebudayaan, Kominfo: sosialisasi gizi buruk -jajan aman</p>
---	--	--	---	---	--

<p>Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah untuk kepentingan masyarakat dan dunia industri</p>	<p>Peningkatan kelibngan ke arah pemecahan masalah masyarakat DIY</p>	<p>Meningkatkan kualitas <i>evidence based-policy</i> untuk menangani masalah sosial (<i>social problems</i>) masyarakat</p>	<p>Bencana Sosial Akibat Pndemi Covid-19 belum usai</p> <p>Optimalisasi DIY Ramah Difabel: sekolah inklusi dan inklusi sosial belum optimal</p>	<p>Tingkat Kerelawanan dan Jiwa Sosial Warga DIY selama Era Pandemi Covid-19</p> <p>Tingkat Ketepatan Distribusi Bantuan Sosial selama Pandemi Covid-19</p> <p>Koordinasi lintas sektoral terhadap kesiapan DIY sebagai daerah inklusi (RAD Difabel)</p> <p>Signifikansi “<i>rebranding</i>” bagi SLB di DIY untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap kaum difabel</p>	<p>Dinas Sosial</p>
---	---	--	---	--	---------------------

<p>Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah untuk kepentingan masyarakat dan dunia industri</p>	<p>Peningkatan ketepatan kegiatan kelibangan untuk pemecahan masalah (<i>problem solving</i>) pendidikan yang dihadapi masyarakat</p>	<p>Meningkatkan dukungan regulasi terhadap iklim kelibangan yang berorientasi pada dampak (<i>outcomes-based research and development</i>) dalam bidang pendidikan</p>	<p>Optimalisasi koordinasi lintas-sektoral dalam mendukung upaya meningkatkan DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025</p> <p>Peningkatan layanan pendidikan bagi kaum difabel sebagai bagian dari upaya menjadikan DIY sebagai daerah inklusi</p> <p>Kemunduran kualitas capaian pendidikan selama masa pembelajaran daring selama Pandemi Covid-19</p> <p>Kecanduan <i>gadget</i> menurunkan kualitas belajar siswa SD-SMA di era informasi?</p>	<p>Kajian multistakeholder proses persiapan menjadikan DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara pada Tahun 2021</p> <p>Studi komparasi antara gagasan SLB “<i>rebranding</i>” dengan praktik sekolah inklusi di DIY</p> <p>Studi evaluatif terhadap dampak kebijakan pembelajaran daring selama Pandemi Covid-19 terhadap capaian kualitas pendidikan siswa SD-SMA di DIY</p> <p>Survey terhadap dampak penggunaan TIK terhadap kualitas belajar siswa SD-SMA di DIY</p>	<p>Dispora</p> <p>Bekerjasama dengan LLDikti V DIY</p> <p>Bekerjasama dengan Dinas Sosial</p> <p>Bekerjasama dengan Dinas Kominfo, Dispora Kota/Kabupaten</p> <p>Bekerjasama dengan Dinas Kominfo, Dispora Kota/Kabupaten</p>
---	---	--	---	---	---

Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah untuk kepentingan masyarakat dan dunia industri	Peningkatan dampak hasil-hasil kelitbangan baik dalam bentuk perəkayasaan teknologi maupun evaluasi kebijakan	Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah untuk memberikan dampak positif bagi keberdayaan masyarakat	Kurang optimal tingkat ketahanan sosial  Kurang optimal daya tahan toleransi sosio-kultural-keagamaan	Riset evaluatif terhadap implementasi Perda Ketahanan Keluarga (2019)  Optimalisasi kampung sebagai pusat ketahanan toleransi sosial: <i>best practices</i> dan <i>lesson learnt</i>  Tingkat Internalisasi semangat/nilai Bhinneka Tunggal Ika dan “ <i>golong-gilig</i> ” di kalangan komunitas rentan friksi sosial  Optimalisasi peran industri musik sebagai media toleransi dan kohesi sosial	Biro Pemberdayaan Masyarakat
--	---	---	---	---	------------------------------

Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah untuk kepentingan masyarakat dan dunia industri	Peningkatan kegiatan kelibngan agar berorientasi pada pemecahan masalah ( <i>problem solving</i> ) dihadapi oleh kaum perempuan dan anak di DIY	Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan mengenai perempuan dan anak sebagai masukan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan berbasis 1) pengarusutamaan gender dan 2) peningkatan kapasitas perempuan	Resiliensi perempuan dalam keluarga dan peran sosial-ekonomi	Pemetaan perkembangan Perempuan Usaha Mikro dan bantuan pengembangan usaha  Tindak Perdagangan Perempuan dan Orang (TPPO/ <i>human trafficking</i> ) di DIY  KDRT terhadap perempuan dan anak di DIY (kemiskinan menjadi pemengaruh?)  Pemetaan aneka peran dan kerjasama lembaga sosial/ NGO dalam perlindungan dan pemajuan hak perempuan dan anak  Sebaran dan penanggulangan anak jalanan, pekerja anak, dan anak putus sekolah di DIY.  Kajian perlindungan hukum terhadap berbagai eksploitasi kebebasan dan hak asasi anak DIY.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk  Kerjasama dengan Biro Hukum dan Kanwil Kemenkumham DIY  Kerjasama dengan Disperindag dan Dinas Koperasi dan UKM  Bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dispora  Dinas Sosial kerjasama dengan Kanwil Kemkumham DIY
--	---	--	--	--	--

<p>Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah untuk kepentingan masyarakat dan dunia industri</p>	<p>Peningkatan dampak dari hasil-hasil kelibangan baik dalam bentuk perencanaan teknologi maupun evaluasi kebijakan dalam bidang pariwisata</p>	<p>Meningkatkan kualitas pelaku pariwisata Meningkatkan daya tarik destinasi wisata secara terintegrasi untuk kepentingan masyarakat dan dunia usaha</p>	<p>Kurang optimalnya kapasitas dan kerjasama antarpelaku pariwisata berbasis komunitas Kurang optimalnya integrasi informasi potensi, atraksi dan fasilitas destinasi wisata berbasis komunitas Kurang optimalnya kerjasama antara pelaku industri pariwisata modern dan pelaku wisata berbasis komunitas Belum adanya destinasi wisata “komunitas Mataraman asli”</p>	<p>Pemetaan kapasitas dan inisiasi kerjasama antardaesa wisata lingkup DIY dan kota/kabupaten Desain promosi wisata terintegrasi berbasis TIK Perkembangan kerjasama antara industri pariwisata modern dan tradisional/ lokal Studi kelayakan potensi inisiasi “kampung mataraman asli” (“kasepuhan mataraman”?)</p>	<p>Dinas Pariwisata</p>
---	---	--	--	--	-------------------------

<p>Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah untuk kepentingan masyarakat dan dunia industri</p>	<p>Peningkatan dampak hasil kelitbang baik dalam bentuk perrekayasa teknologi maupun evaluasi kebijakan sektor lingkungan hidup</p>	<p>Meningkatkan kajian dampak pembangunan untuk mendukung kualitas upaya capaian SDGs pada tingkat kelurahan</p> <p>Meningkatkan serapan hasil penelitian berperspektif ekologi manusia dalam penerapan pembangunan berkelanjutan</p> <p>Meningkatkan regulasi berbasis riset untuk mengoptimalkan kualitas konservasi hutan dan perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan melibatkan peran serta masyarakat</p>	<p>Belum optimalnya usaha mencegah degradasi kualitas lingkungan hidup yang bisa menghambat pencapaian SDGs</p>	<p>Pemetaan kerusakan alam: konservasi hutan, RTH, penyusutan volume dan ketersediaan air tanah</p> <p>Studi tentang daya dukung ekologis terhadap kebutuhan demografis DIY</p> <p>Simulasi potensi krisis lingkungan hidup <i>vis a vis</i> tingkat kecepatan degradasi kualitas alam karena alih-guna lahan dan bencana alam</p> <p>Pengukuran kesadaran ekologis integral komunitas warga pada lokasi strategis daya dukung alam DIY</p> <p>Survei kualitas pencapaian target SDGs pada tingkat kelurahan</p>	<p>Badan Lingkungan Hidup</p>
---	---	---	---	--	-------------------------------

Sumber: Hasil Wawancara, FGD dan Studi Pustaka (2021)

### 3.3.3. Indikasi Program Kelitbangan Bidang Ekonomi Pembangunan

Mengingat RPJMD DIY Tahun 2022–2027 sedang disusun maka acuan arah kelitbangan bidang Ekonomi Pembangunan didasarkan pada dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta seperti RPJPD DIY Tahun 2005 -2025, RPJMD DIY Tahun 2017 – 2022, RKPD DIY Tahun 2020 dan Rencana Strategis (Renstra) periode 2017-2022 dari OPD terkait langsung dengan ekonomi pembangunan.

#### 3.3.3.1. Permasalahan

##### 1. Menurunkan Ketimpangan Pengeluaran

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur ketimpangan atau kesenjangan pengeluaran penduduk, menggunakan indikator Gini Ratio dan Distribusi pengeluaran menurut Bank Dunia (BPS DIY, 2021). Formula Gini Ratio adalah: Koefisien Gini yang didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk (BPS, 2021). Nilai rasio gini berada pada rentang antara 0 sampai dengan 1. Nilai rasio gini yang semakin besar bahkan mendekati angka satu itu menunjukkan semakin tinggi tingkat ketimpangan penduduk di suatu wilayah.

Tabel berikut menyajikan perkembangan Rasio Gini DIY selama periode 2015-2020. Dalam periode tersebut, perkembangannya cenderung berfluktuasi baik untuk wilayah perdesaan dan perkotaan. Sejalan dengan kondisi tersebut maka Rasio Gini DIY (gabungan perdesaan dan perkotaan) juga cenderung fluktuatif. Tahun 2014-2016, Rasio Gini mengalami penurunan dari 0,435 pada tahun 2014 menjadi 0,425 pada tahun 2016. Pada tahun 2017-2020, Rasio Gini mengalami kenaikan dan penurunan. Per September 2020, Rasio Gini sebesar 0,437 dan itu berarti mengalami peningkatan jika dibandingkan pada bulan yang sama tahun 2019.

Peningkatan Gini Rasio selama periode 2019 – 2020, dapat diduga terkait dengan dampak Pandemi Covid-19. Jika dibandingkan

dengan provinsi lain, Gini Rasio DIY pada tahun 2020 yang sebesar 0,437 adalah tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data BPS DIY (2021), terdapat 7 provinsi (DIY, Gorontalo, DKI, Jawa Barat, Papua, Sultra, dan NTB) dengan Gini Ratio di atas Gini Ratio Indonesia yang sebesar 0,385.

Pada Maret 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk D.I. Yogyakarta mengalami peningkatan. Kondisi tersebut tercermin dari angka rasio gini pada Maret 2021 yang tercatat sebesar 0,441 atau naik 0,004 poin dibandingkan September 2020 yang sebesar 0,437. Peningkatan angka rasio gini terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan. Di perkotaan, angka rasio gini tercatat sebesar 0,448 atau naik 0,009 poin dalam satu semester terakhir. Adapun di perdesaan angka rasio gini pada Maret 2021 sebesar 0,334 atau naik 0,005 poin dibandingkan kondisi September 2020. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, pada Maret 2021, tingkat ketimpangan di D.I. Yogyakarta masih berada pada kategori ketimpangan sedang. Hal tersebut tercermin dari persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah yang besarnya mencapai 15,44 persen dari total pengeluaran penduduk D.I. Yogyakarta.

Meningkatnya Gini Rasio di DIY dan tertinggi di Indonesia harus mendapat perhatian ekstra dari Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Berbagai kebijakan yang telah diterapkan untuk menekan ketimpangan selama ini harus dievaluasi. Berbagai alternatif kebijakan harus diperhitungkan dan dikaji secara cermat sehingga jika diterapkan akan lebih efektif dan berdaya guna.

## 2. Menurunkan Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah

Ketimpangan pendapatan antar wilayah/daerah dilihat dengan instrumen Indeks Williamson (IW). Indeks Williamson nilainya antara nol dan satu ( $0 < IW < 1$ ), di mana semakin mendekati nilai nol artinya wilayah tersebut semakin tidak timpang. Apabila mendekati satu maka wilayah tersebut semakin timpang. Ketimpangan atau kesenjangan tersebut terjadi di daerah tingkat di bawahnya. Misalnya, Indeks Williamson provinsi menunjukkan tingkat

ketimpangan pendapatan antara kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, perkembangan Indeks Williamson di DIY mengalami penurunan secara gradual, meskipun penurunan ini tidak menunjukkan angka yang berarti. Angka Indeks Williamson yang berada di atas 0,45 masih berada di tingkat ketimpangan sedang (masih di bawah 0,5). Alokasi penganggaran pembangunan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi ini di masa yang akan datang, tampak perlu mendapat perhatian khusus. Strategi alokasi anggaran harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi provinsi, di sisi lain juga menjadi instrumen untuk mengurangi ketimpangan wilayah di bawahnya.

### 3. Menurunkan Kemiskinan

BPS DIY pada tanggal 15 Februari 2021 telah mengeluarkan publikasi Profil Kemiskinan DIY September 2020. Seperti diketahui, BPS mengukur kemiskinan menggunakan konsep kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Berdasarkan konsep tersebut, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan & bukan makanan).

Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan (setara 2100 kkalori perkapita perhari). Garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok non-makanan lainnya. Selanjutnya definisi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan.

Selama periode 2015-2019 kemiskinan (perdesaan dan perkotaan) di DIY menunjukkan kecenderungan menurun (lihat Tabel). Sebagai contoh, pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin (perdesaan dan perkotaan) di DIY sebesar 13,16 persen dan turun menjadi 12,80 persen pada tahun 2020. Jika dicermati, dibandingkan

tahun 2019 maka kemiskinan (perdesaan dan perkotaan), kemiskinan perdesaan serta kemiskinan perkotaan mengalami peningkatan. Dalam periode September 2019-September 2020, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan dari 11,44 persen menjadi 12,80 persen.

Mengacu data BPS DIY (2021), persentase penduduk miskin di perdesaan lebih besar dibandingkan di perkotaan. Persentase penduduk miskin di perdesaan sebanyak 14,57%. Dengan kata lain secara rata-rata terdapat sekitar 14 penduduk miskin di antara 100 orang penduduk di perdesaan. Selanjutnya persentase penduduk miskin di perkotaan sebanyak 12,17% atau terdapat 12 penduduk miskin dari 100 penduduk perkotaan di DIY.

Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2020 tersebut lebih tinggi dari rata-rata persentase penduduk miskin nasional yaitu sebesar 10,19%. Kondisi ini menjadikan DIY berada di posisi ke-11 dari seluruh provinsi di Indonesia. Provinsi paling tinggi persentase penduduk miskin adalah Papua (26,80%) dan paling rendah adalah Bali (4,45%). Provinsi yang paling dekat dengan peringkat DIY adalah Sumatera Selatan (12,98%) dan Lampung (12,76%).

Pada Maret 2021 jumlah penduduk miskin di DIY bertambah menjadi 506,45 ribu orang. Dengan demikian, persentase penduduk miskin D.I. Yogyakarta pada Maret 2021 sebesar 12,80% lebih tinggi dibandingkan September 2020. Pemda DIY beserta Pemkab/ Pemkot harus lebih bekerja keras dan bersinergi untuk menerapkan berbagai program untuk menurunkan kemiskinan. Dalam kondisi Pandemi Covid-19, tentu diperlukan berbagai terobosan dalam mengimplementasikan kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan.

4. Menurunkan Ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Menurut BPS DIY (2021), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent

standard of living). Selanjutnya IPM dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Setidaknya ada tiga manfaat IPM, yaitu (BPS, 2021): (1) indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). (2) Menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. (3) Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. Menurut BPS (2021), dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Produk Nasional Bruto (PNB) menggantikan Produk Domestik Bruto (PDB) karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Berdasarkan tabel, capaian/level IPM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama periode 2015-2020 selalu meningkat dan lebih tinggi dari capaian IPM nasional. Pada tahun 2020, capaian IPM DIY mencapai level level 79,97 dan berada dalam kategori “IPM Tinggi” dan mencapai peringkat kedua tertinggi setelah DKI Jakarta. Pada tahun 2020, IPM DIY sedikit mengalami penurunan dari 79,99 pada tahun 2019 menjadi 79,77 pada tahun 2020. Menurut BPS DIY (2021), penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan indeks pada dimensi standar kehidupan yang layak yang tidak mampu dikompensasi oleh kenaikan indeks pada dimensi kesehatan dan dimensi pengetahuan. Untuk diketahui, Rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan selama 2020 mencapai Rp14,02 juta dan

turun 2,63 persen dibandingkan dengan tahun 2019 akibat Pandemi Covid-19. Pandemi yang terjadi saat ini harus diakui berdampak terhadap segala aspek kehidupan masyarakat. Semoga pandemi cepat berlalu.

#### 5. Menurunkan Pengangguran Terbuka

Berdasarkan data dari Sakernas, pada Agustus 2020 jumlah pengangguran di DIY sebesar 101,85 ribu orang sedangkan pada Agustus 2019 jumlah pengangguran sebesar 71,48 ribu orang yang artinya meningkat sebanyak 30,36 ribu orang. Permasalahan dari angka pengangguran ini menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat sebesar 1,39 persen yakni, pada Agustus 2019 sebesar 3,14 persen meningkat pada Agustus 2020 menjadi 4,57 persen akibat dampak pandemi COVID-19 yang membuat tenaga kerja banyak yang dirumahkan atau di PHK sehingga pengangguran di DIY meningkat.

TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja. TPT digunakan untuk memonitoring dan mengevaluasi indikator ketenagakerjaan dalam pembangunan. Selama tiga tahun terakhir, TPT DIY menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada Februari 2020, TPT sebesar 3,38 persen kemudian meningkat tajam menjadi 4,57 persen pada Agustus 2020. Kenaikan tersebut karena adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Namun, secara perlahan TPT menurun menjadi 4,28 persen pada Februari 2021. TPT DIY pada Februari 2021 sebesar 4,28%, mengalami peningkatan 0,9% poin dibanding TPT Februari 2020 (3,38%).

### 3.3.3.2. Kebijakan dan Strategi Menurunkan Kemiskinan dan Ketimpangan

Permasalahan ekonomi yang pokok di DIY adalah tingginya persentase kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Baik persentase penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan (Rasio Gini) DIY di atas angka nasional. Untuk itu diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat serta operasional untuk menurunkan kemiskinan dan ketimpangan tersebut.

Dalam upaya pengetasan kemiskinan di DIY, Pemerintah Daerah DIY perlu menempuh kebijakan antara lain *pertama*, mempertajam dan membuat prioritas program kemiskinan yang nyata, setelah memetakan permasalahan kemiskinan masyarakat perdesaan dan perkotaan. *Kedua*, menambah dan memfokuskan anggaran dalam APBD yang bersifat produktif untuk mendorong usaha-usaha mikro dan kecil masyarakat DIY sebagai upaya meningkatkan pendapatan per kapita dan kesejahteraan. *Ketiga*, mengembangkan sektor ekonomi unggulan daerah yang sangat potensial agar dapat memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi ekonomi masyarakat secara keseluruhan, termasuk penduduk miskin dan berpenghasilan sangat rendah. *Keempat*, pemerintah kabupaten/kota di DIY perlu terus meningkatkan koordinasi dalam kebijakan dan implementasi setiap program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat miskin, sehingga tidak terkesan tumpang tindih dan berjalan sendiri-sendiri. *Kelima*, pendekatan *participatory* dalam mengurangi angka kemiskinan penduduk di DIY, dapat dipertahankan dan dikembangkan dengan memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mandiri.

Selanjutnya Pemerintah Daerah DIY diharapkan melakukan percepatan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka melaksanakan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan, dilaksanakan program penanggulangan kemiskinan bersasaran (*targeted program*). Program-program penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan menargetkan langsung kepada mereka yang tergolong miskin dan sangat miskin. Program penanggulangan kemiskinan kepada mereka

yang membutuhkan diharapkan akan jauh lebih efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kebijakan dan strategi tersebut diimplementasikan dalam beberapa kelompok program sebagai berikut (TNP2K, 2020). :

1) Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Rumah Tangga atau Keluarga (Klaster I)

Kelompok pertama adalah program-program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah rumah tangga/keluarga. Program tersebut antara lain: Program Keluarga Harapan, (PKH - *conditional cash transfer*), bantuan langsung tunai tanpa syarat (*unconditional cash transfer*), bantuan langsung dalam bentuk *in-kind*, misalnya pemberian beras bagi masyarakat miskin (raskin), serta himbuan bagi kelompok masyarakat rentan seperti mereka yang cacat, lansia, yatim/piatu dan sebagainya.

2) Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Komunitas (Klaster II)

Kelompok kedua adalah program-program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah komunitas. Program penanggulangan kemiskinan bersasaran komunitas dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip pemberdayaan masyarakat (*Community Driven Development*).

3) Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Usaha Mikro dan Kecil (Klaster III)

Kelompok program ketiga adalah program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah usaha mikro dan kecil. Tujuan program ini adalah memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

4) Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat (Klaster IV)

Kelompok program keempat adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap ketersediaan pelayanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Program-program dalam kelompok ini adalah program kemiskinan lain yang secara langsung

atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Strategi, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di DIY diformulasikan dengan mempertimbangkan *existing condition* pengentasan kemiskinan di DIY. Pertimbangan itu mencakup sejumlah faktor kekuatan dan kelemahan yang ada dan peluang dan hambatan/ancaman yang sedang dihadapi atau akan dihadapi oleh Pemerintah Daerah DIY di masa mendatang. Program dan kegiatan termaksud difokuskan di wilayah kantong kemiskinan, khususnya di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman.

Danais selama ini dialokasikan untuk kegiatan budaya dan pembangunan yang terkait dengan tata ruang. Kegiatan tersebut tidak langsung berdampak pada penurunan kemiskinan. Dana keistimewaan (Danais), sudah digunakan untuk pengembangan Desa Mandiri Budaya (termasuk di dalamnya Desa Wisata), implementasi kebijakan tersebut harus diterapkan secara optimal agar menjadi efek pengganda perekonomian desa bersama anggaran dana desa. Terakhir Danais juga telah digunakan membantu untuk mengatasi dampak Pandemi Covid-19, baik ekonomi dan kesehatan, bagi UMKM. Kebijakan tersebut langsung atau tidak langsung dapat membantu menurunkan kemiskinan di DIY.

Bank Dunia (2016) mengidentifikasi enam strategi yang berpeluang memberi dampak untuk menurunkan ketimpangan pendapatan/pengeluaran dan ketimpangan antar wilayah. Strategi tersebut mengungkap kebijakan yang terbukti telah menambah penghasilan masyarakat miskin, memperbaiki akses masyarakat terhadap layanan penting, dan memperkuat prospek pembangunan jangka panjang tanpa merusak pertumbuhan. Kebijakan ini berkinerja baik ketika didampingi oleh pertumbuhan yang kuat, manajemen makro ekonomi yang baik, dan pasar tenaga kerja yang dapat menciptakan lapangan kerja dan memungkinkan masyarakat termiskin untuk memanfaatkan peluang tersebut.

- 1) Pengembangan anak usia dini dan gizi.

- 2) Perlindungan kesehatan untuk semua.
- 3) Akses pendidikan bermutu untuk semua.
- 4) Infrastruktur pedesaan – terutama jalan dan penyediaan listrik.
- 5) Bantuan tunai kepada keluarga miskin.
- 6) Sistem perpajakan yang progresif.

Secara konseptual, pengurangan ketimpangan dapat dilakukan melalui tiga cara (Dartanto, 2017): 1) melakukan distribusi kekayaan dari kelompok atas ke kelompok bawah, 2) mendorong perkembangan kelas menengah (kelompok 40%-80%) karena indeks Gini sangat sensitif terhadap perubahan di kelas menengah, 3) pertumbuhan inklusif dengan kelompok masyarakat bawah harus tumbuh lebih cepat jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat atas.

Kerangka konseptual kebijakan di atas dapat diterjemahkan menjadi 5 (lima) kebijakan utama yang dapat dilakukan pemerintah untuk menurunkan ketimpangan di Indonesia, antara lain (Dartanto, 2017):

Pertama, peningkatan *tax ratio* dan kepatuhan pembayaran pajak. Peningkatan rasio pajak merupakan cara untuk mendistribusikan kekayaan dari kelompok atas untuk kelompok di bawahnya. Kenaikan rasio pajak berarti meningkatkan transfer dari kelompok kaya ke kelompok miskin.

Kedua, kebijakan perpajakan merupakan cara konvensional untuk melakukan redistribusi kekayaan kelompok atas, kebijakan pajak sangat progresif akan mendorong penggelapan dan penghindaran pajak dari kelompok atas. Oleh karena itu, sistem redistribusi dapat dilakukan dengan mendorong adanya *personal social responsibility* (PSC) dengan kelompok kaya didorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan filantropi untuk membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

Ketiga, keterpaduan antara pengembangan sumber daya manusia dan peta jalan transformasi perekonomian. Transformasi struktural dari sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa

yang tidak terarah merupakan salah satu penyebab ketimpangan di Indonesia.

Keempat, pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Korupsi yang pastinya dilakukan kelompok atas (berkuasa) merupakan salah satu bentuk regressive transfer dengan sumber daya mengalir dari kelompok bawah menuju ke kelompok atas, sebagai contohnya, korupsi dana bantuan sosial untuk masyarakat miskin.

Kelima, perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan miskin melalui kebijakan kesehatan, pangan, pendidikan dan perumahan. Kebijakan itu bertujuan memberikan jaring pengaman kepada kelompok miskin dan hampir miskin sehingga mereka bisa bekerja dan berusaha lebih baik.

Beberapa kebijakan dan program yang telah dilakukan oleh Pemda DIY untuk mengatasi ketimpangan pendapatan sebagai berikut (Pemda DIY, 2017): (1) Pemenuhan wirausaha baru yang mandiri. (2) Peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi rumah tangga miskin. (3) Meningkatkan peluang kesempatan kerja, memperbanyak penempatan tenaga kerja. peningkatan kualitas pekerja dan calon pekerja, pengawasan dan hubungan industrial. (4) Pemenuhan ketercukupan pangan dan gizi masyarakat. (5) Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat miskin. (6) Peningkatan penduduk berakses air bersih layak. (7) Peningkatan penduduk berakses energi, (8) Penyediaan tempat tinggal yang layak dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah.

Rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, dan juga ketimpangan antar wilayah, di DIY sebagai berikut. Pertama, meneruskan dan mengoptimalkan berbagai program untuk menurunkan ketimpangan pendapatan (dan kemiskinan) dengan mensinergikan berbagai program organisasi perangkat daerah serta melibatkan pemangku kepentingan, misalnya dunia usaha melalui program *corporate*

*social responsibility* (CSR) dan pengabdian masyarakat/kuliah kerja nyata (KKN) perguruan tinggi (PTN/PTS).

Kedua, Pemda DIY beserta Pemkab/Pemkot di wilayah DIY lebih fokus dan meningkatkan alokasi anggaran untuk program menurunkan ketimpangan (dan kemiskinan) khususnya program yang terkait dengan: (i) peningkatan kualitas pelayanan dasar publik seperti air bersih, sanitasi, gizi dan pelayanan kesehatan), (ii) menurunkan kemiskinan (Melalui stabilisasi harga pangan dan subsidi /bantuan sosial yang tepat sasaran), memberikan peluang pekerjaan (Melalui peningkatan keahlian dan sertifikasi, magang, kemitraan dengan industri, dan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja), (iii) menurunkan ketimpangan kekayaan (Melalui subsidi, program afirmasi yang efektif, kredit bagi usaha ultra mikro, mikro dan kecil), dan (iv) menguatkan industri berbasis rakyat (Melalui penguatan industri kecil, optimalisasi potensi perhutanan sosial, peningkatan skala usaha tani dan nelayan, dan pengembangan destinasi wisata). Untuk diketahui, jika berbagai program untuk menurunkan ketimpangan pmdatan atau pengeluaran tersebut dapat berhasil dengan efektif maka juga akan berpengaruh dalam menurunkan ketimpangan antar wilayah.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi kebijakan pada Pemerintah Daerah DIY dapat disusun tema kelitbangan bidang Ekonomi pembangunan periode 2022 sampai dengan 2027 (Tabel 3.3).

**Tabel 3.3 Tema Kelitbang Bidang Ekonomi Pembangunan Pemerintah Daerah DIY, Tahun 2022 - 2027**

<b>Isu Strategis</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Strategi</b>	<b>Isu Bidang</b>	<b>Tema Kelitbang</b>	<b>OPD</b>
Keberadaan BRIDA peluang terwujudnya konektivitas dan sinergisitas riset di daerah menjadi lebih besar	Meningkatkan dampak/ dampak dari hasil-hasil kelitbang baik dalam bentuk perakayasaan teknologi maupun evaluasi kebijakan	Mendorong regulasi yang dapat meningkatkan iklim kelitbang berbasis dampak riset untuk masyarakat dan dunia industri	Regulasi dan Insentif Bagi Lembaga Litbang Pemerintah/Swasta Mempercepat realisasi pengembangan kawasan industri	Impak Litbang terhadap perekonomian daerah, khususnya pemulihan ekonomi Kemudahan regulasi dan insentif bagi litbang untuk mendorong inovasi dan invensi di daerah	Bappeda ( <i>leader</i> ), serta Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
Keberadaan BRIDA peluang terwujudnya konektivitas dan sinergisitas riset di daerah menjadi lebih besar	Meningkatkan dampak/ dampak dari hasil-hasil kelitbang baik dalam bentuk perakayasaan teknologi maupun evaluasi kebijakan	Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah untuk kepentingan masyarakat dan dunia industri	Peningkatan kuantitas dan kualitas pangan, produktivitas lahan pertanian, serta keamanan dan ketahanan pangan	Peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil produksi pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi	Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY serta Bappeda ( <i>leader</i> )

Keberadaan BRIDA peluang terwujudnya konektivitas dan sinergisitas riset di daerah menjadi lebih besar	Meningkatkan dampak/ dampak dari hasil-hasil kelibangan baik dalam bentuk perakyasaan teknologi maupun evaluasi kebijakan	Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah untuk kepentingan masyarakat dan dunia industri	Optimalisasi pengembangan usaha/ industri kreatif dan usaha/industri digital ( <i>start up</i> ), termasuk UMKM.  Optimalisasi produk ekspor DIY untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi	Kontribusi usaha/ industri kreatif dan digital (UMKM) terhadap perekonomian daerah, khususnya pemulihan ekonomi Strategi optimalisasi pengembangan usaha/ industri kreatif dan digital (UMKM) di daerah untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi Strategi, optimalisasi, dan evaluasi peningkatan daya saing produk ekspor DIY di pasar internasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perizinan dan Penanaman moda. Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY serta Bappeda ( <i>leader</i> )
Keberadaan BRIDA peluang terwujudnya konektivitas dan sinergisitas riset di daerah menjadi lebih besar	Meningkatkan dampak/ dampak dari hasil-hasil kelibangan baik dalam bentuk perakyasaan teknologi maupun evaluasi kebijakan	Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah untuk kepentingan masyarakat dan dunia industri	Pariwisata DIY dari <i>mass tourism</i> menuju <i>quality tourism</i> untuk mendukung pemulihan ekonomi	Identifikasi potensi <i>quality tourism</i> di DIY  Evaluasi, kebijakan dan strategi serta tahapan menuju industri <i>quality tourism</i>	Dinas Pariwisata, Paniradya Kaistimewan, serta Bappeda ( <i>leader</i> )

Keberadaan BRIDA peluang terwujudnya konektivitas dan sinergisitas riset di daerah menjadi lebih besar	Mengarahkan kegiatan-kegiatan kelitbang agar berorientasi pada pemecahan masalah ( <i>problem solving</i> ) yang berkembang dan dihadapi oleh masyarakat	Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah untuk kepentingan masyarakat dan dunia industri	Upaya menurunkan kemiskinan di perdesaan dan perkotaan Upaya menurunkan ketimpangan pengeluaran  Upaya menurunkan ketimpangan antar wilayah	Kebijakan dan strategi serta evaluasi untuk menurunkan kemiskinan  Kebijakan dan strategi serta evaluasi untuk menurunkan ketimpangan pengeluaran  Kebijakan dan strategi serta evaluasi untuk menurunkan ketimpangan antar wilayah	Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY, Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan  Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR dan ESDM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Paniradya Kaistimewaan, serta Bappeda ( <i>leader</i> )
--	--	--	--	---	--

<p>Keberadaan BRIDA peluang terwujudnya konektivitas dan sinergisitas riset di daerah menjadi lebih besar</p>	<p>Mengarahkan kegiatan-kegiatan kelitbang agar berorientasi pada pemecahan masalah (<i>problem solving</i>) yang berkembang dan dihadapi oleh masyarakat</p>	<p>Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah untuk kepentingan masyarakat dan dunia industry</p>	<p>Pengendalian inflasi dan daya beli masyarakat</p>	<p>Kebijakan dan strategi serta evaluasi program pengendalian inflasi dari aspek pasokan (<i>supply side</i>)</p> <p>Kebijakan dan program serta evaluasi pengendalian inflasi dari sisi permintaan (<i>demand side</i>)</p> <p>Rantai distribusi dan pasokan produk kebutuhan pokok</p> <p>Kebijakan dan strategi serta evaluasi program untuk meningkatkan IPM dan menurunkan disparitas IPM antar Kabupaten/Kota/Kecamatan</p> <p>Kebijakan dan strategi serta evaluasi program untuk meningkatkan SDG's (TPB).</p>	<p>Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY, Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMWKM, Dinas Perizinan dan Penanaman modal serta Bappeda (<i>leader</i>). Dinas Perhubungan, Dinas PUPR dan ESDM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Bappeda (<i>leader</i>)</p>
<p>Keberadaan BRIDA peluang terwujudnya konektivitas dan sinergisitas riset di daerah menjadi lebih besar</p>	<p>Mengarahkan kegiatan-kegiatan kelitbang agar berorientasi pada pemecahan masalah (<i>problem solving</i>) yang berkembang dan dihadapi oleh masyarakat</p>	<p>Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta SDG's / TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)</p>	<p>Kebijakan dan strategi serta evaluasi program untuk meningkatkan IPM dan menurunkan disparitas IPM antar Kabupaten/Kota/Kecamatan</p> <p>Kebijakan dan strategi serta evaluasi program untuk meningkatkan SDG's (TPB).</p>	<p>Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY, Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMWKM, Dinas Perizinan dan Penanaman modal serta Bappeda (<i>leader</i>). Dinas Perhubungan, Dinas PUPR dan ESDM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Bappeda (<i>leader</i>)</p>	

Keberadaan BRIDA peluang terwujudnya konektivitas dan sinergisitas riset di daerah menjadi lebih besar	Mengarahkan kegiatan-kegiatan kelitbang agar berorientasi pada pemecahan masalah ( <i>problem solving</i> ) yang berkembang dan dihadapi oleh masyarakat	Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah untuk kepentingan masyarakat dan dunia industri	Optimalisasi pemanfaatan Dana Keistimewaan (Danais) untuk mendorong pemulihan ekonomi dan kesehatan bagi pelaku UMKM  Optimalisasi pemanfaatan Dana Keistimewaan (Danais) untuk mendorong pemulihan ekonomi bagi Desa Mandiri BUDAYA (termasuk Desa Wisata Budaya)	Kebijakan dan strategi serta evaluasi pemanfaatan Danais untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan bagi UMKM  Kebijakan dan strategi serta evaluasi pemanfaatan Danais untuk pengembangan Desa Mandiri Budaya (termasuk Desa Wisata Budaya)	Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY, Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perizinan dan Penanaman modal serta Bappeda ( <i>leader</i> ).  Paniradya Kaistimewaan.
--	--	--	--	---	---

Sumber: Hasil Wawancara, FGD dan Studi Pustaka (2021)

### **3.3.4. Indikasi Program Kelitbangan Bidang Sarana Prasarana (Infrastruktur)**

Mengingat RPJMD DIY Tahun 2022 – 2027 sedang disusun maka acuan arah kelitbangan bidang sarana prasarana (infrastruktur) didasarkan pada dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta seperti RPJPD DIY Tahun 2005 -2025, RPJMD DIY Tahun 2017 – 2022, LKPJ DIY Tahun 2020 dan Rencana Strategis (Renstra) periode 2017 -2022 dari OPD terkait langsung pembangunan sarana prasarana (infrastruktur).

#### **3.3.4.1 Permasalahan**

##### **1. Peningkatan Kualitas Kebersihan Lingkungan**

Peningkatan kualitas kebersihan lingkungan tidak terlepas dari sanitasi dan penyediaan air bersih yang merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dalam SDGs sebagaimana tercantum dalam tujuan ke 6 yaitu Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua.

Sanitasi merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Manfaat sanitasi adalah mencegah penyakit menular, mencegah kecelakaan, mencegah timbulnya bau tidak sedap, menghindari pencemaran, mengurangi jumlah persentase sakit, serta lingkungan menjadi bersih, sehat dan nyaman.

Sedangkan air bersih adalah air yang memenuhi syarat kesehatan ialah jernih, tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, tidak mengandung kuman dan zat-zat berbahaya. Air bersih merupakan kebutuhan pokok manusia, dimana kebutuhannya dari hari kehari dirasakan semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan ketergantungan masyarakat dan juga pola hidup masyarakat terhadap air.

Terkait dengan tema ini maka tema kelitbangan pertama adalah Optimalisasi Pembudayaan Pengelolaan Sistem Pengolahan Air Limbah Permukiman Berbasis Individu, Keluarga dan Komunal. Perlu

dipahami bahwa derajat kualitas kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh bagaimana air limbah yang dihasilkan oleh suatu pemukiman dapat diolah sedemikian rupa agar tidak mencemari lingkungan. Sistem pengolahan air limbah dapat dilakukan skala individu dan keluarga artinya dilaksanakan oleh tiap rumah dan keluarga serta skala komunal yang dilakukan oleh lingkungan kompleks perumahan atau kelurahan bahkan perkotaan.

Dalam SDGs disyaratkan bahwa dalam suatu lingkungan harus tersedia sistem air limbah setempat sebesar 85% dan 15% pemenuhan kebutuhan dasar. Kondisi lingkungan pada banyak pemukiman di DIY masih jauh dari persyaratan SDGs karena pengelolaan air limbah belum dilaksanakan secara optimal sehingga diperlukan adanya penelitian tentang “Optimalisasi Pengelolaan Sistem Pengolahan Air Limbah Permukiman Berbasis Individu Keluarga, dan Komunal”

Tema kelitbang kedua yaitu Pengembangan Sumber-Sumber Air Potensial Untuk Penyediaan Air Bersih Guna Meningkatkan Kesehatan Masyarakat. Tidak terbantahkan bahwa derajat kualitas kehidupan manusia sangat ditentukan oleh ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (100%), inilah yang menjadi sorotan dalam SDGs dan Nawacita. Meskipun data Bappenas menunjukkan bahwa 81,30% penduduk di perkotaan telah mempunyai akses terhadap air bersih, tetapi baru mencapai 60,58% di perdesaan.

Gubernur DIY menjelaskan bahwa wilayah Yogyakarta mengalami krisis air bersih akibat meletusnya Gunung Merapi pada 2010. Ketersediaan air bersih menjadi persoalan bagi DIY dan membutuhkan solusi cepat. Salah satu upayanya mempercepat pembangunan SPAM Regional Kamijoro.

Pada Tahun 2019 total produksi air bersih yang dihasilkan mencapai 57.904 ribu meter kubik. Sekitar 94,77 persen pelanggan adalah rumah tangga, dengan volume air bersih yang disalurkan

untuk pelanggan tersebut mencapai 88,09 persen dari total air bersih yang dihasilkan.

Untuk menjaga kontinuitas kapasitas produksi, perusahaan-perusahaan air bersih yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta mengambil air tanah sebagai sumber utamanya, baik air tanah dangkal maupun dalam. Di samping sungai, mata air dan waduk juga merupakan pilihan bagi perusahaan untuk menambah volume air yang disalurkan. Selain penggunaan air tanah dan mata air, air sungai juga digunakan sebagai tambahan. Secara keseluruhan, air yang berasal dari air tanah merupakan yang tertinggi yaitu 67,17%, kemudian berasal dari mata air 16,93%, sungai 7,64%, dan waduk 2,74%.

Oleh sebab itu tema kelitbangan kedua ini menjadi sangat penting dalam upaya untuk mencari solusi penyediaan air bersih bagi masyarakat secara berkelanjutan. Diperlukan adanya penelitian terhadap ketersediaan sumber air dan sumber daya air di DIY sehingga dapat menambah kapasitas penyediaan air bersih (dan air irigasi) serta terpeliharanya potensi air tanah melalui penyediaan sarana dan prasarana secara berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat dengan kualitas kehidupan yang lebih baik.

## 2. Peningkatan Kegiatan Ekonomi Berkelanjutan

Salah satu masalah yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah antara pemenuhan kebutuhan pembangunan dengan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan (Fauzi, 2004). Sumber daya alam, termasuk sumberdaya mineral dan batuan, merupakan sumber daya alam yang tidak diperbarukan (*unrenewable*) dengan daya dukung yang terbatas. Ini yang sering tidak dipahami atau dilupakan oleh masyarakat, yang dengan dalih untuk mendukung pembangunan mereka mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memikirkan ketersediaan di masa depan bagi generasi mendatang.

Tanpa ada kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya alam, terutama dalam bentuk sediaan energi baik dalam bentuk BBM, gas

alam dan sebagainya, maka dapat dipastikan dalam waktu tidak lama akan terjadi gangguan dalam kegiatan ekonomi. DIY memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi seperti tenaga angin, tenaga air, tenaga gelombang laut, panas bumi dan tenaga surya.

Berdasarkan data pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN periode 2018 - 2027 disebutkan DIY memiliki potensi panas bumi yang diperkirakan mencapai 10 Mwe di Parangtritis dan Gunungkidul. Selain itu, terdapat pula potensi energi angin sebesar 50 MW di Wates dan sebesar 70 MW di Bantul.

Masyarakat DIY menyadari hal ini dan berusaha untuk ikut serta dalam menyusun kebijakan publik dalam penggunaan dan pemanfaatan sumber energi. Untuk itu diusulkan adanya tema kelitbangan tentang Pengembangan Sumber Potensial Energi Baru Terbarukan dan Teknologi Energi Bersih dalam upaya mempertahankan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dari sisi penyediaan EBT.

Sumber daya alam mencakup sumber daya hayati, diantaranya adalah hutan. Pada 2020 tercatat luas hutan di DIY yang hanya sekitar 19.133,95 Ha atau sekitar 17% dari luas DIY, Perlu dipahami bahwa hutan tidak hanya memberikan kontribusi bagi kegiatan perekonomian wilayah, tetapi juga terkait dengan kelestarian lingkungan maka sangat perlu untuk dilaksanakan kajian dengan tema Pengembangan Perhutanan Sosial Di DIY.

Perhutanan Sosial memasuki babak dan sejarah baru ketika UU Cipta Kerja mengadopsinya melalui pasal tambahan 29A dan 29B. Selama ini perhutanan sosial hanya dinaungi oleh peraturan menteri. Pasal 29A dan 29B tersebut telah diturunkan pengaturannya melalui pasal 203-247 Peraturan Pemerintah Nomor 23/2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Aturan terbaru adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9/2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Pengembangan Perhutanan Sosial di DIY bertujuan agar aktivitas perekonomian melalui sektor kehutanan dan pelestarian hutan dapat berkelanjutan. Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.

Salah satu filosofi pembangunan DIY adalah Hamemayu Hayuning Bawana yang terjemahan umumnya adalah “Ikut Berperan dalam Menjaga Kelestarian Dunia”. Dalam SDGs, kelestarian lingkungan hidup menjadi target sasaran akhir dari pembangunan berkelanjutan. Berdampingan dengan tata ruang wilayah maka tata kelola lingkungan hidup menjadi syarat mutlak bagi lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh angka Indeks Kualitas Air (IKA) DIY tahun 2020 sebesar 38,43 belum memenuhi target RPJMD (38,60). dan jika dibandingkan dengan capaian IKA pada tahun 2019 (38,65), maka angka IKA tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2020 ini, parameter dominan yang melebihi bakumutu air sungai adalah parameter Bakteri Coli Tinja dan Bakteri Total Coliform. Hal ini menunjukkan bahwa kadar pencemar yang mendominasi berasal dari limbah domestik.

Berdasarkan hasil perhitungan data kualitas udara ambien dengan metode passive sampler, diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 89,14 telah melebihi target RPJMD (88,40). Jika dibandingkan dengan nilai IKU tahun 2019 sebesar 85,25, maka pada tahun 2019 ini, nilai IKU mengalami peningkatan.

Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, seperti transportasi, penyediaan ruang terbuka hijau, pengawasan penggunaan bahan emisi yang tidak ramah lingkungan, serta

dukungan pihak lain seperti masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, faktor alam juga dapat mempengaruhi kualitas udara yaitu meteorologi dan bencana, seperti kebakaran lahan dan meletusnya gunung berapi. Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui beberapa intervensi seperti kebijakan pengendalian pencemaran udara, insentif dan disinsentif, pemantauan dan penyediaan data akurat, teknologi, membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain, serta penghargaan serta sanksi.

Angka Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY tahun 2020 sebesar 124,41 (terjadi penurunan sebesar 24,38 dibandingkan tahun 2019) menunjukkan bahwa risiko bencana di DIY masih tinggi dan masih diperlukan beberapa upaya yang harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk menurunkan indeks risiko bencana.

Pemda DIY berupaya untuk menurunkan Indeks tersebut dengan melakukan berbagai hal untuk meminimalisir dampak terhadap bencana, diantaranya dengan melakukan upaya pembinaan kepada masyarakat, sosialisasi dan penguatan kelembagaan bencana di masyarakat antara lain melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana

Oleh sebab itu, diusulkan adanya tema kelitbangan Pengembangan Tata Kelola Lingkungan Hidup DIY Yang Berkesinambungan Dan Berkelanjutan Dalam Upaya Untuk Pencegahan Pencemaran, dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Sebagai Pewujudan Dari Hamemayu Hayuning Bawana. Dapat dipastikan dari pengelolaan lingkungan hidup yang baik akan menjamin adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

### 3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat DIY dalam bidang ekonomi adalah tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang masih tinggi. Kedua hal ini ditunjukkan dari hasil survey BPS per September 2020 yaitu jumlah warga miskin di DIY sebanyak 503.140 jiwa atau sekitar 12,80 persen dari penduduk DIY dengan Garis Kemiskinan sebesar Rp 465.428 per kapita per bulan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Ketimpangan Regional yang diukur dengan Indeks Williamson sebesar 0,45 tergolong sedang dan nilai Indeks Gini DIY mencapai 0,434 (tergolong tingkat ketimpangan sedang) lebih tinggi dari nasional (0,381) pada Tahun 2020.

Untuk mengatasi masalah ini, ada dua tema kelitbangan yang akan diterapkan yaitu:

1. Tema kelitbangan pertama adalah Pengembangan Kebutuhan Pemukiman Dan Perumahan Dengan Konsep *Transit Oriented Development* (TOD) Yang Aman Bencana, Memenuhi Standar Kualitas Lingkungan, Dan Pengembangan Sistem Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR). Tema ini diharapkan menjadi salah satu cara pendekatan pengembangan kota yang mengadopsi tata ruang campuran dan maksimalisasi penggunaan angkutan massal. Kemanfaatan dari penerapan konsep ini adalah masyarakat tidak harus menggunakan kendaraan pribadi untuk tiba di tempat kerja, mobilitas yang lebih fleksibel dari lokasi hunian ke moda transportasi dan tentunya memangkas waktu tempuh yang berarti biaya transport sehari-hari dapat ditekan. Dengan konsep ini pula diharapkan akan terjadi peningkatan peluang ekonomi dan akses lapangan kerja. Masyarakat penghuni TOD bisa membuka banyak usaha mulai dari kuliner, fesyen hingga aksesoris dan banyak lagi manfaat yang bisa diambil. Kawasan TOD di DIY dapat dikembangkan sistem kerjasama antara Pemda DIY, Pengembang dan PT KAI. Kawasan TOD pernah direncanakan akan dibangun di Kawasan Stasiun Tugu pada tahun 2018 kerjasama antara Pemda DIY dengan PT. KAI.

Alternatif lain potensi pembangunan TOD di DIY adalah Kawasan Stasiun Maguwo. Kawasan telah memiliki sistem integrasi intermoda yang baik antara empat moda transportasi yaitu pesawat udara (melalui bandara Adisutjipto), kereta api (melalui stasiun Maguwo), bus Trans Jogja (melalui halte bandara), dan bus antar kota (bus Damri) yang melayani rute menengah dan jarak jauh.

2. Tema kelitbangan kedua adalah Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi Untuk Peningkatan Produktivitas Petani Dan Mendukung Program Ketahanan Pangan

Pada tahun 2020, produksi padi mengalami penurunan sebesar 7,63 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya. Secara lebih rinci, produksi padi sebanyak 533.650,82 ton dengan luas panen sebesar 111.948,42 ha dan produktivitas panen sebesar 47,67 kwintal per ha relatif sama dengan produktivitas tahun sebelumnya yaitu 47,86 kwintal per ha. Hal ini menggambarkan selama dua tahun terakhir produktivitas padi di DIY relatif statis. Produktivitas sawah tertinggi tahun 2020 adalah Kabupaten Bantul dengan menghasilkan 57,73 kwintal/hektar. Kabupaten ini menghasilkan 127 ribu ton atau 23,9 % dari total produksi padi se-DIY.

Tujuan akhir dari tema kelitbangan kedua ini adalah untuk meningkatkan produktivitas padi yang maksimal untuk mendukung peningkatan derajat ekonomi masyarakat, terutama masyarakat petani di DIY dan ketahanan pangan.

4. Penurunan Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah

Konektivitas antar wilayah diwujudkan dalam ketersediaan infrastruktur yang meminimalisir adanya kesenjangan antar wilayah, meratakan pembangunan, dan memangkas kemiskinan suatu negara. Konektivitas merupakan pembangunan infrastruktur menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja, dan mengakselerasi perekonomian rakyat. Dapatkan informasi,

inspirasi dan insight di email kamu.. Dampak konektivitas tersebut memberikan potensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Konektivitas antar wilayah tidak hanya menghubungkan wilayah-wilayah dalam suatu negara, tetapi secara aktif mempersatukan negara dan membangun kesejahteraan rakyat.

Manfaat dari konektivitas antar wilayah antara lain adalah kemudahan akses dari suatu wilayah lainnya, kemudahan akses sumber daya, dan peningkatan investasi.

Untuk mendukung konektivitas antar wilayah yang berdampak kepada pengembangan pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan memegang peranan penting. Di DIY per 2020 telah terbangun 248 Km jalan Nasional, jaringan jalan Provinsi sepanjang 783 Km dan jaringan jalan Kabupaten 3.330 Km.

Dalam rangka mendukung aksesibilitas di wilayah DIY maka perlu mengembangkan fungsi jalan dan mempertahankan jalan status provinsi dalam kondisi mantap. Pengembangan jaringan jalan yang dikembangkan antara lain Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), Pengembangan Jalur Selokan Mataram, Jogjakarta Outer Ringroad (JORR), Prambanan – Gading, serta rintisan Bedah Menoreh. Pengembangan fungsi jalan dapat meningkatkan aksesibilitas baik dari aspek kewilayahan maupun aspek sektoral.

Terkait dengan peningkatan konektivitas antar wilayah di DIY maka tema kelitbang yang diusulan adalah Peningkatan Konektivitas Dan Aksesibilitas Antar Wilayah Untuk Menunjang Pemulihan Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berkelanjutan

Walaupun jaringan jalan di Indonesia telah berkembang, ternyata tidak dapat mengikuti perkembangan kebutuhan lalu lintas terutama di perkotaan. Hal yang sama terjadi di aglomerasi perkotaan DIY yang nampak nyata pada saat akhir pekan terjadi kemacetan di banyak titik. Masalah kemacetan lalu lintas tersebut harus diatasi dengan diterbitkannya kebijakan publik yang didasarkan kepada kajian ilmiah. Salah satu yang diusulkan sebagai prioritas pemecahan

masalah adalah pelaksanaan penelitian tentang Implementasi Teknologi Infrastruktur Transportasi Modern Untuk Mengantisipasi Perkembangan Transportasi Di Masa Mendatang, Memperhitungkan Keterkaitan Dan Keterpaduan Antar Moda (Darat, Laut Dan Udara) Dan Antar Wilayah, Serta Ramah Lingkungan. Hasil penelitian tersebut akan digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem transportasi yang efektif efisien guna mengantisipasi perkembangan di masa mendatang dan terkoneksi dengan Sistem Konektivitas Nasional dan Sistem Mobilitas Nasional. Dengan sistem transportasi yang efektif efisien maka diharapkan kesenjangan ekonomi antar wilayah akan berkurang.

Antisipasi perkembangan transportasi di aglomerasi perkotaan DIY harus didukung dengan penerapan Sistem Transportasi Cerdas (*Intelligent Transport System*). Untuk itu perlu didukung dengan penelitian tentang Kelanjutan Pengembangan Dan Penerapan *Intelligent Transport System* (ITS) untuk Aglomerasi Perkotaan.

Pada saat ini, penerapan ITS di perkotaan Yogyakarta dilaksanakan pada jenis Layanan Lalu Lintas berupa CCTV pada simpang, pengaturan lalu lintas simpang; pada jenis Layanan Angkutan Umum, berupa Pemasangan GPS pada bus Trans Jogja, *Bus Information System* di halte, sistem *smart card* yang saat ini telah bekerjasama dengan pihak perbankan (BNI, Mandiri, BCA, dan BRI) dan sudah dikembangkan untuk memfasilitasi kartu mahasiswa UGM sebagai tiket Trans Jogja, serta aplikasi yang bernama “Teman Bus” yang merupakan akronim dari Transportasi Ekonomis, Mudah, Andal dan Nyaman. Aplikasi ini berisi rute, titik-titik halte, hingga jadwal bus yang bersifat real time, sehingga memudahkan masyarakat dalam memantau kedatangan dan keberangkatan bus secara *mobile* dan tepat waktu.

Hasil penelitian akan dibutuhkan untuk kelanjutan pembuatan desain infrastruktur jalan yang efisien dan efektif yang memenuhi perkembangan moda lalu lintas berbasis teknologi informasi di masa mendatang.

## 5. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah

Ada 2 (dua) tema yang diusulkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintah DIY. Tema pertama adalah Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pemahaman bahwa tata kelola pemerintah yang baik harus didasarkan kepada perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan didasarkan kepada hasil penelitian akademis (evidence based).

Merupakan tugas BAPPEDA untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik dalam bentuk RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Meskipun secara nasional diakui sebagai yang terbaik, namun harus diakui bahwa selalu muncul kesenjangan pada masa transisi antara rencana program. Contoh kesenjangan tersebut misalnya RPJMD antar periode, ada bagian-bagian yang tidak berkesinambungan dan sering dipertanyakan keberlanjutan program-program sebelumnya. Melalui kegiatan kelitbang yang diselenggarakan, BAPPEDA sebagai OPD yang bertanggungjawab dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu menjamin adanya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Tema kedua untuk meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan adalah Peningkatan Riset Pemanfaatan Satelit Penginderaan Jauh (Inderaja) untuk Pembuatan Sistem Informasi Geospasial. Hasil penelitian dapat digunakan menyusun Sistem Informasi Geospasial untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan tata ruang dan pertanahan dalam mengobservasi dan mengakses keberadaan bidang-bidang tanah dengan berbagai status alas hak, baik tanah masyarakat, tanah desa, tanah milik pemerintah maupun tanah SG serta tanah PAG.

Selain itu, salah satu teknologi yang dapat membantu untuk mendeteksi bencana alam dan bagaimana cara mitigasinya adalah dengan menggunakan penginderaan jauh. Dengan menggunakan data penginderaan jauh, wilayah yang sulit untuk diakses oleh penduduk sekalipun dapat terdeteksi dengan aktual dan cukup baik

tanpa kontak langsung dengan objek atau daerah tersebut sehingga dapat mengurangi risiko bencana dengan ketersediaan kecukupan informasi dan data tentang bencana.

#### 6. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan.

Semenjak diundangkan pada tahun 2012, belum pernah dilakukan assesmen terhadap kapasitas pengelolaan dan implemementasi dari Undang Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU Keistimewaan), terutama terkait dengan masalah Pertanahan dan Tata Ruang.

Dengan tema kelitbangan Pengembangan Sistem IT untuk Mendukung Keistimewaan maka penelitian yang dilaksanakan akan dapat menghasilkan data dan informasi terkait dengan kapasitas implementasi dari Undang-Undang Keistimewaan, terutama terkait dengan kewenangan pertanahan dan tata ruang, yang dalam penelitian geospasial tidak dibahas secara detil dan hanya memberikan gambaran tentang delineasi dari tanah SG dan PAG.

Dalam kaitannya dengan keberadaan SG dan PAG, permasalahan terkait hak alas tanah sampai saat ini belum bisa ditata dengan baik. Masalah pertanahan ini tidak dapat lepas dari masalah tata ruang di DIY yang diakui sebagai Tata Ruang Keistimewaan. Tema kelitbangan tentang Evaluasi Dan Penyusunan Tata Ruang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu upaya untuk melestarikan dan mengembangkan Keistimewaan DIY sebagai salah satu warisan budaya dunia yang memerlukan adanya penataan kawasan dan penataan ruang jalan secara terintegrasi berdasarkan nilai-nilai filosofi yang dikandungnya serta menampilkan nilai-nilai luhur universal (*outstanding universal values*), serta meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan tanah SG, PAG dan Tanah Desa.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi kebijakan pada Pemerintah Daerah DIY dapat disusun tema kelitbangan bidang sarana dan prasarana (infrastruktur) periode 2022 sampai dengan 2027 (Lihat Tabel 3.4).

**Tabel 3.4. Tema Kelitbangan Bidang Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) DIY**

Tahun 2022 - 2027

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Isu Bidang	Tema Kelitbangan	OPD <i>Leading Sector</i>
Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah untuk kepentingan masyarakat dan dunia industri	Meningkatkan dampak/ dampak dari hasil-hasil kelitbangan baik dalam bentuk perkeayaan teknologi maupun evaluasi kebijakan	Mendorong regulasi yang dapat meningkatkan iklim kelitbangan berbasis dampak riset untuk masyarakat dan dunia industri	Kesenjangan ekonomi antar wilayah	Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral. Bidang Bina Marga
Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah untuk kepentingan masyarakat dan dunia industry	Meningkatkan dampak/ dampak dari hasil-hasil kelitbangan baik dalam bentuk perkeayaan teknologi maupun evaluasi kebijakan	Mendorong regulasi yang dapat meningkatkan iklim kelitbangan berbasis dampak riset untuk masyarakat dan dunia industri	Masih rendah kualitas kehidupan masyarakat	a. Optimalisasi Pembudayaan Pengelolaan Sistem Pengolahan Air Limbah Permukiman Berbasis Individu, Keluarga dan Komunal. b. Pengembangan Sumber-Sumber Air Potensial Untuk Penyediaan Air Bersih Guna Meningkatkan Kesehatan Masyarakat. c. Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi Untuk Peningkatan Produktivitas Petani Dan Mendukung Program Ketahanan Pangan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral. Bidang Sumberdaya Air

Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah untuk kepentingan masyarakat dan dunia industri	Meningkatkan dampak/ dampak dari hasil-hasil kelibangan baik dalam bentuk perakyasaan teknologi maupun evaluasi kebijakan	Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah untuk kepentingan masyarakat dan dunia industri	Masih kurang kesejahteraan masyarakat dalam bidang perumahan	Pengembangan Kebutuhan Pemukiman Dan Perumahan Dengan Konsep <i>Transit Oriented Development (TOD)</i> Yang Aman Bencana, Memenuhi Standar Kualitas Lingkungan, Dan Pengembangan Sistem Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR)	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral. Bidang Cipta Karya
Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah untuk kepentingan masyarakat dan dunia industri	Meningkatkan dampak/ dampak dari hasil-hasil kelibangan baik dalam bentuk perakyasaan teknologi maupun evaluasi kebijakan	Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah untuk kepentingan masyarakat dan dunia industri	Masih rendah aktivitas perekonomian berkelanjutan dan perakyasaan energi	Pengembangan Sumber Potensial Energi Baru Terbarukan dan Teknologi Energi Bersih	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral. Bidang Energi Sumber Daya Mineral
Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah untuk kepentingan masyarakat dan dunia industri	Meningkatkan dampak/ dampak dari hasil-hasil kelibangan baik dalam bentuk perakyasaan teknologi maupun evaluasi kebijakan	Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah untuk kepentingan masyarakat dan dunia industri	Masih rendah penerapan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pengembangan Tata Kelola Lingkungan Hidup DIY Yang Berkelanjutan dan Penerapannya Dalam Upaya Untuk Pencegahan Pencemaran, dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Sebagai Perwujudan Dari Hamemayu Hayuning Bawana.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah untuk kepentingan masyarakat dan dunia industry	Meningkatkan dampak/ dampak dari hasil-hasil kelibangan baik dalam bentuk perakyasaan teknologi maupun evaluasi kebijakan	Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah untuk kepentingan masyarakat dan dunia industry	Masih rendah pengembangan hutan berkelanjutan dan pengusahannya bernilai ekonomi	Pengembangan Perhutanan Sosial Di DIY	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah untuk kepentingan masyarakat dan dunia industry	Meningkatkan dampak/ dampak dari hasil-hasil kelibangan baik dalam bentuk perakyasaan teknologi maupun evaluasi kebijakan	Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah untuk kepentingan masyarakat dan dunia industry	Masih terdapat kesenjangan ekonomi antar wilayah dan belum optimal pelayanan angkutan jalan	Kelanjutan Pengembangan Dan Penerapan <i>Intelligent Transport System</i> (ITS) untuk Aglomerasi Perkotaan	Dinas Perhubungan
Keberadaan BRIDA peluang terwujudnya konektivitas dan sinergitas riset di daerah menjadi lebih besar	Meningkatkan dampak/ dampak dari hasil-hasil kelibangan baik dalam bentuk perakyasaan teknologi maupun evaluasi kebijakan	Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah untuk kepentingan masyarakat dan dunia industry	Masih terdapat kesenjangan ekonomi antar wilayah dan belum optimal pelayanan angkutan jalan	Implementasi Teknologi Infrastruktur Transportasi Modern Untuk Mengantisipasi Perkembangan Transportasi Di Masa Mendatang, Memperhitungkan Keterkaitan Dan Keterpaduan Antar Moda (Darat, Dan Udara) Dan Antar Wilayah, Serta Ramah Lingkungan	Dinas Perhubungan
Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah untuk kepentingan masyarakat dan dunia industry	Meningkatkan dampak/ dampak dari hasil-hasil kelibangan baik dalam bentuk perakyasaan teknologi maupun evaluasi kebijakan	Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah untuk kepentingan masyarakat dan dunia industry	Belum optimalnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

<p>Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah untuk kepentingan masyarakat dan dunia industry</p>	<p>Meningkatkan dampak/impak dari hasil-hasil kelitbang baik dalam bentuk perekayasa teknologi maupun evaluasi kebijakan</p>	<p>Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah untuk kepentingan masyarakat dan dunia industri</p>	<p>Belum Optimal Kapasitas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)</p>	<p>a. Peningkatan Riset Dan Pemanfaatan Satelit Inderaja Untuk Pembuatan Sistem Informasi Geospasial. b. Pengembangan Sistem IT Untuk Mendukung Keistimewaan DIY c. Evaluasi Dan Penyusunan Tata Ruang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>	<p>d. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)</p>
---	--	---	--	---	---



- 1) Pembinaan dan penguatan ideology Pancasila
- 2) Penumbuhan *digital government* dalam *smart village*
- 3) Penumbuhan *big data*, integrasi data, *sharing data* dan *open data* untuk *smart village*.
- 4) Pengembangan *e-public service* untuk pengembangan regormasi birokrasi

Tema kelitbangan ekonomi pembangunan dengan fokus sebagai berikut:

- 1) Kebijakan dan strategi serta evaluasi untuk menurunkan kemiskinan.
- 2) Kebijakan dan strategi serta evaluasi untuk menurunkan ketimpangan pengeluaran.
- 3) Kebijakan dan strategi serta evaluasi untuk menurunkan ketimpangan antar wilayah.
- 4) Kebijakan dan strategi serta evaluasi program untuk meningkatkan IPM dan menurunkan disparitas IPM antar Kabupaten/Kota/Kecamatan.

Tema kelitbangan sosial kemasyarakatan dengan fokus sebagai berikut:

- 1) Pelestarian sejarah dan warisan budaya.
- 2) Pengembangan sarana dan prasarana budaya
- 3) Pengembangan perhutanan sosial

Tema kelitbangan prasarana dan sarana (infrastruktur) dengan fokus sebagai berikut:

- 1) Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah
- 2) Pengembangan sumber-sumber bersih yang potensial
- 3) Pengembangan pengelolaan jaringan irigasi untuk meningkatkan produktivitas
- 4) Pengembangan kebutuhan pemukiman dan perumahan dengan konsep *transit oriented Development*
- 5) Implementasi teknologi transportasi modern

## BAB IV

# STRATEGI PELAKSANAAN

Berdasarkan pada strategi kelitbang daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya, berikut diuraikan dan dijelaskan terkait dengan strategi pelaksanaan RIK DIY yang dipilah menjadi dua bagian, yaitu kelembagaan dan evaluasi pelaksanaan.

### 4.1. KELEMBAGAAN

Aspek kelembagaan diawali dengan mencermati Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk menyusun kebijakan dan rencana program, melaksanakan penelitian dan pengembangan, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama, serta pembinaan. Berkaitan dengan tugas pelaksanaan penelitian dan pengembangan tersebut, luaran (*output*) kegiatan kelitbang secara umum berupa rekomendasi, model, *pilot project*/percontohan, selain artikel jurnal dan laporan kajian.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (selanjutnya disebut UU Sisnas IPTEK) secara jelas mengemukakan tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan pengkajian kebijakan, diantaranya terkait manfaat pengkajian, jaringan pengetahuan, sistem informasi IPTEK dan lembaga yang berwenang dalam mengorkestrasikan kegiatan pengkajian kebijakan dalam ruang lingkup tertentu. Sebagai turunan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),

pemerintah daerah dimandatkan untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Kajian tentang kebijakan publik adalah penunjang pemerintahan yang memiliki posisi sangat penting untuk memberikan dan menyediakan stok pengetahuan (*stock of knowledge*) bagi pembuat kebijakan (*policy maker*) sehingga secara kelembagaan perlu diakomodasi secara optimal optimal agar pelaksanaan tugas dan fungsi pengkajian kebijakan publik dapat berjalan lancar. Peran tersebut dijalankan oleh perangkat daerah yang membidangi kelitbangan.

Sebagaimana BRIN, BRIDA bertugas untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi. Karena BRIDA harus mengorkestrasikan riset dan inovasi, mendeteksi dan mengidentifikasi topik riset yang strategis dan inovatif, serta menjadi badan intelijen riset mulai dari hulu sampai hilir agar kelembagaan iptek dapat bersinergi mendukung implementasi prioritas riset daerah (PRD) maka diperlukan penyusunan skema pengkajian kebijakan terintegrasi untuk mendukung proses kebijakan publik daerah ke depan. Selain BPPSD, berbagai OPD Pemerintah DIY memiliki peran ini yang secara umum telah melakukan kerja penelitian, pengkajian dan evaluasi kebijakan. Namun bila BRIDA nanti didirikan maka perlu dilakukan skema pengkajian sinergis antara tugas dan fungsi BRIDA dan BPPSD yang berada di bawah Bappeda DIY. Posisi dan fungsi Dewan Riset Daerah perlu ditinjau kembali berkaitan dengan kehadiran BRIDA ini.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beberapa potensi dalam kelitbangan. Pertama, DIY memiliki data pembangunan cukup komprehensif pada berbagai OPD. Kedua, DIY sedang mengalami perkembangan infrastruktur yang bersifat strategis seperti JLSS, Tanjung Adikarto, Aetropolis dan Bedah Menoreh yang berkembang bersamaan dengan proses pembangunan YIA. Ketiga, DIY memiliki kerjasama pentahelix untuk mengatasi dampak kejadian luar biasa yang dapat dilapis dengan kerja kelitbangan untuk mendalami penyebab, proses terjadinya, dampak dan antisipasi ke depan.

Namun kerja kelitbangan DIY menghadapi beberapa masalah. Pertama, SDM fungsional peneliti secara kuantitas masih terbatas. Kedua, meskipun

kerjasama kelitbangan antara BPPSD dan OPD-OPD telah terjalin namun hal itu belum masuk ke dalam konektivitas tema riset. Hal serupa terjadi pada relasi kerjasama kelitbangan dengan lembaga lain di luar OPD. Kedua, hasil-hasil penelitian antarlembaga belum terintegrasi dengan baik. Relasi dalam hal ini masih pada tahap manual, belum dilayani secara digital: website dan aplikasi. Ketiga, aneka hasil riset yang dilakukan oleh para peneliti dirasakan belum memiliki dampak optimal terhadap masyarakat. Keempat, kerjasama kelitbangan antardaerah belum secara optimal dilakukan.

Berdasarkan kedua hal di atas maka kelembagaan kelitbangan perlu untuk ditata dan dikelola. Agar memiliki kerjasama yang baik dan efektif, kerja kelitbangan perlu memiliki lembaga yang memiliki tiga peran berikut ini:

1. Tim Kelitbangan yang terdiri dari Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang. Unsur Pelaksana bertugas untuk: a) melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan; dan b) melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan kepada kepala instansi penyelenggara kelitbangan. Unsur Pelaksana beranggotakan: a) Pengarah, yaitu pejabat fungsional keahlian tingkat madya atau Pejabat Tinggi Pratama/Pejabat Administrator; b) Ketua, yaitu pejabat fungsional keahlian atau Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas yang ditugaskan; dan c) Anggota, yaitu pejabat dengan fungsional keahlian atau Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas, ahli/pakar/praktisi, dan tenaga lainnya. Unsur Penunjang secara umum bertugas untuk memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan tahapan kelitbangan serta pelayanan administratif dan manajerial.
2. Tim Pengendali Mutu (TPM), bertugas untuk: a) memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan; b) melakukan pengendalian sesuai tahapan kelitbangan; c) memberikan saran dan masukan kepada Majelis Pertimbangan guna penyempurnaan kelitbangan; dan d) melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada Majelis Pertimbangan. TPM beranggotakan kepala institusi penyelenggara kelitbangan, sekretaris institusi penyelenggara kelitbangan, dan tenaga ahli/pakar/

praktisi serta Pimpinan/Administrator pada lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

3. Majelis Pertimbangan (MP), bertugas untuk: a) memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan; b) memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan c) memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan. MP beranggotakan Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi, kepala institusi penyelenggara kelitbangan, dan tenaga ahli/pakar/praktisi.

Ketiga peran ini menentukan hasil kerja kelitbangan yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan tugas OPD untuk mewujudkan visi pembangunan DIY tahun 2025, yaitu menjadi “Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.

#### **4.1.1. Koordinasi Pelaksanaan**

Koordinasi pelaksanaan kelitbangan paling tidak perlu memperhatikan empat hal utama, yaitu unsur, kelembagaan, ranah kerja, format luaran dan diseminasi hasil. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam kerja kelitbangan adalah RIK, Koordinator dan Pelaksana RIK. Sebagai dokumen Pemerintah Daerah DIY yang berisi petunjuk pelaksanaan kegiatan kelitbangan di DIY maka semua OPD harus mengacu pada dokumen resmi ini dalam melaksanakan tugas kelitbangan. Oleh karena itu, RIK bukanlah hanya dokumen Bappeda DIY semata melainkan merupakan dokumen sebagai acuan kerja bersama.

Kelitbangan membutuhkan koordinasi kelembagaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai bagian integral pemerintahan daerah, maka semua aturan-parundangan perlu diikuti. Institusi penyelenggara kelitbangan DIY harus mengikuti tata laksana penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya: a) Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; dan c) peraturan perundangan turutannya. Selain itu, institusi penyelenggara kelitbangan DIY harus mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 tahun 2018

tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada lingkup internal pemerintahan daerah DIY, koordinasi kelitbang perlu memperhatikan seluruh isi aturan dan ketentuan tersebut dalam menjalankan tugas. Guna mengantisipasi adanya ego sektoral karena masing-masing OPD memiliki orientasi kelitbang sesuai dengan posisi birokrasi masing-masing maka diperlukan kewenangan yang kuat agar sistem, mekanisme, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi serta tindak-lanjut kerja kelitbang terintegrasi ini bisa dilakukan. Sistem teknologi dan informasi dapat membantu kerja koordinatif ini agar seluruhnya bersifat transparan, terpindai, terukur dan terintegrasi sehingga seluruh hasil kerja kelitbang dapat dilacak dari OPD mana saja. Semua OPD dapat saling berbagi hasil kejian, penelitian atau evaluasi kebijakan yang dilakukan melalui layanan dunia maya ini. Efisiensi waktu dan tenaga serta efektifitas kerja dapat dioptimalkan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi ini.

Ranah kerjasama kelitbang antar lembaga atau OPD yang selama ini berada pada ranah penelitian, pengkajian dan evaluasi kebijakan dapat dioptimalkan bersamaan dengan upaya melakukan ekspansi ranah kerja yang baru sesuai dengan ketentuan-perundangan. Menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, ranah kerja kelitbang secara sistematis terdiri dari penelitian, pengembangan, pengkajian, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan. Kesemua ranah kerja itu saling berkaitan dan bersifat interaktif-siklis. Jikalau kerja kelitbang OPD selama ini berfokus pada penelitian, pengkajian dan evaluasi kebijakan maka perlu dikembangkan ke ranah lain yang belum menjadi fokus perhatian selama ini. Pengembangan, perekayasaan, penerapan dan pengoperasian perlu didalami makna, maksud, peran dan posisinya dalam kelitbang untuk kemudian menjadi kesadaran kerja bersama bahwa keempat ranah ini pun secara yuridis menjadi bagian dari

skope kerja kelitbangan. Koordinasi antarOPD menjadi keharusan untuk mencapai kualitas dan kuantitas hasil kelitbangan ini.

Mengingat SDM kelitbangan DIY memiliki keterbatasan kuantitas maka koordinasi perlu melibatkan pihak eksternal pemerintah daerah dan lembaga-lembaga pemerintahan pada tingkat nasional sejauh berkaitan dengan upaya pencapaian visi RPJMD. Koordinasi ini bisa dilakukan secara kelembagaan melalui berbagai media. Adanya jaringan penelitian (jarlit) menjadi modal yang baik untuk melakukan koordinasi eskternal. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi perlu pula dimanfaatkan untuk memudahkan koordinasi kelitbangan. Penyediaan “layanan maya” (online services) melalui website dan aplikasi media sosial yang relevan dapat mendukung kerja koordinatif ini. Bidang prioritas yang ada pada RPJMD akan membantu kerja kelitbangan dalam mengefektifkan kerjasama kelitbangan dengan cara kerja yang efisien. Pemetaan perguruan tinggi, LSM, lembaga penelitian dan industri perlu dilakukan agar dapat dideteksi apa saja kepakaran SDM mereka dan hasil penelitian dan pengkajian yang selama ini telah dilakukan.

Bila menurut skema kerja berdasarkan pemendagri tersebut arah kerja kelitbangan adalah berada di dalam skope kerja kebijakan maka kiranya perlu dicermati apa sajakannya luaran dari koordinasi kelitbangan ini. Keluaran kelitbangan secara umum berupa rekomendasi, model, pilot project/ percontohan, artikel jurnal dan laporan kajian. Format keluaran tentu saja mengikuti pula permintaan kebutuhan pemerintah daerah dalam merencanakan kebijakan, menerapkan, mengevaluasi dan merumuskan rencana tindak-lanjut dari semua hasil kajian yang ada.

Keluaran itu didiseminasikan secara internal dan eksternal pemerintahan daerah. Untuk itu, BPPSD sebagai koordinator kelitbangan perlu menyelenggarakan sosialisasi hasil seminar dalam bentuk seminar, lokakarya maupun diskusi kelompok terarah. Pemilihan topik penelitian yang akan dipresentasikan ditentukan oleh tingkat kemanfaatan hasil penelitian tersebut. Hal ini bisa melibatkan OPD dan aneka lembaga eksternal yang sesuai dengan topik atau bidang di mana hasil luaran kelitbangan itu berada. Dengan demikian, media dan proses diseminasi luaran ini bisa memantik

dan mendorong sinergi yang lebih baik bukan hanya internal pemerintahan daerah tetapi juga eksternal pemerintahan daerah. Dengan demikian, golong-gilig antara pemerintahan daerah dan aneka lembaga di masyarakat dalam terjadi dan keduanya mendorong upaya pembangunan DIY secara lebih baik dengan menyukseska RKPD dan RPJMD.

#### 4.1.2. Keterlibatan Institusi Kelitbangan

Pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan pemangku kepedulian (*shareholder*) yang terlibat di dalam pelaksanaan RIK ini adalah seluruh lembaga penelitian dan pengembangan internal Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, lembaga litbang Kabupaten/Kota di DIY, lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah pusat yang ada di DIY, perguruan tinggi negeri maupun swasta di DIY, lembaga litbang swasta dan nonpemerintah serta industri (bila memiliki Divisi Research and Development/R&D).

Keterlibatan para pemangku kepentingan dan kepedulian tersebut bisa secara simultan, kelompok, per bidang dan komplementer bekerjasama untuk menghasilkan keluaran (*output*) kegiatan kelitbangan utama, pendukung serta penunjang sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2016 di atas. Proses kelitbangan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan rencana tindak-lanjut dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan kepedulian kelitbangan tersebut. Di dalam pelaksanaan juga dapat dilakukan sinergi kerjasama, saling berbagi sumberdaya (tenaga, anggaran dan sarana prasarana) serta pengelompokan pelaku sesuai bidang prioritas kelitbangan yang suportif terhadap pencapaian visi, misi, sasaran dan target capaian pembangunan RPJMD.

Untuk itu, pemetaan keterlibatan pada masing-masing pelaku yang berkomitmen untuk terlibat menjadi penting untuk dilakukan. Setiap lembaga, baik OPD maupun aneka lembaga di luar pemerintahan daerah, memiliki rekam jejak kelitbbangan. Mereka bisa dipetakan aktivitasnya masing-masing sehingga diketahui mereka memiliki rekam jejak penelitian apa saja serta kiprah pengembangan apa saja dan apakah hasil dari kedua

kegiatan kelitbangan ini. Pada rekam jejak kelitbangan itu juga bisa diketahui siapa sajakah yang terlibat dan dengan kapasitas serta keahlian apa sajakah yang dimiliki.

Bank data tema penelitian dan pengembangan, peneliti dengan aneka keahlian dan rekam jejak, serta kerjasama apa saja yang pernah dilakukan dapat dijadikan data dasar kelitbangan tingkat DIY. Bank data akan memudahkan untuk dikumpulkan bila didukung dengan perancangan sistem informasi secara digital sehingga dimiliki data besar (*big data*) DIY yang dapat diakses dari dan oleh berbagai lembaga kelitbangan. Pada titik ini, keterlibatan bukan hanya pada aras pelaku (SDM dan lembaga) tetapi juga pada cakupan tema, bidang, kerjasama dan jaringan, bahkan lokasi kegiatan kelitbangan serta luaran (*output*) dan dampak (*outcomes* dan *impacts*) yang dihasilkan.

#### **4.1.3. Kerjasama dan Sinergitas Pelaksanaan**

Kerjasama dan sinergitas pelaksanaan kelitbangan dilakukan melalui komunikasi, sharing program, sumberdaya dan koordinasi dalam kegiatan sehingga tercapai keharmonisan program. Kerjasama dan sinergitas ini akan dapat dilakukan lebih sistematis, efektif dan efisien bila big data dan jejaring digital telah menghubungkan antara lembaga kelitbangan baik internal maupun eksternal pemerintahan daerah melalui koordinasi Bappeda DIY. Bappeda DIY, sebagaimana disebut dimuka, berperan untuk mengkoordinir kerjasama dan sinergi kelitbangan dengan berbagai institusi kelitbangan karena perencanaan pembangunan berada pada tugas dan fungsi lembaga ini.

RIK periode sebelumnya dengan sangat baik telah menyebutkan tentang hal-hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam kerjasama sinergis ini. Hal itu adalah: (1) kerja sama penelitian dan pengembangan; (2) kerja sama pembiayaan penelitian; (3) sayembara pelaksanaan penelitian; dan (4) penjaminan kekayaan intelektual melalui paten (serta hak cipta). Berkaitan dengan ketentuan mengenai pendirian Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai turunan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang telah dicanangkan pemerintah pusat belum lama ini maka seluruh kerjasama

sinergis itu bukan hanya berhenti pada pencatatan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) tetapi juga memrosesnya lebih lanjut ke inovasi dan hilirisasi produk IPTEKS untuk masyarakat luas. Kerjasama dengan industri dan berbagai lembaga terkait menjadi penting untuk kerjasama sinergis pada tahap lanjut dari luaran kerja kelitbangannya sebelumnya. Identifikasi lembaga, produk dan orientasi menuju inovasi dan hilirisasi ini kiranya menjadi perlu dilakukan sebagai persiapan bagi pendirian BRIDA di DIY.

Pada cakupan kebijakan pembangunan daerah, bila kerjasama dan sinergitas pelaksanaan kerja kelitbangannya ini bisa dilakukan bersama maka masukan perencanaan pembangunan daerah akan memadai sehingga apa yang direncanakan bukan hanya secara teknokratis menghasilkan RPJPD dan RPJMD yang baik, tetapi juga secara publik hal itu sungguh mengarah pada kepentingan masyarakat luas yang menjadi “ibu” dari keberadaan pemerintahan daerah. Hal ini menjadi relevan oleh karena kita mengambil bentuk negara “republik”, yang memang seluruh perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan itu diabdikan untuk publik. Dengan demikian, kerjasama dan sinergitas pelaksanaan kelitbangannya adalah pijakan untuk berdharma-bhakti bagi kesejahteraan rakyat, bagi keadilan sosial, untuk masyarakat warga DIY.

## **4.2. EVALUASI PELAKSANAAN**

Berdasarkan Peraturan Kemenpan-RB RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, evaluasi kelembagaan instansi pemerintah ini mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Dimensi struktur mencakup 3 (tiga) sub dimensi yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Evaluasi kelembagaan pada dimensi struktur maka akan tertuju pada ketiga hal ini pula. Oleh karena dimensi proses organisasi mencakup 5 (lima) sub dimensi, yakni keselarasan (*alignment*), tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*), perbaikan dan peningkatan proses, manajemen resiko, dan teknologi informasi, maka kelima sub dimensi ini akan menjadi fokus evaluasi kelembagaan terkait dengan dimensi proses organisasi dalam melaksanakan kegiatan kelitbangannya. Evaluasi terhadap kedua dimensi pokok organisasi

dimaksud merupakan langkah awal untuk membangun suatu sistem evaluasi lembaga instansi pemerintah dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas kelitbangan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, "*evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membandingkan realisasi program kerja kelitbangan terhadap rencana kerja yang mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome)*". Hasil evaluasi inilah yang dilaporkan sebagai capaian kerja kelitbangan untuk dinilai dan dipelajari untuk perbaikan kerja kelembagaan di masa datang. Evaluasi pelaksanaan kelitbangan oleh lembaga pemerintah dilakukan pada waktu setiap berakhirnya kegiatan dalam satu tahun anggaran secara langsung oleh unit kerja yang bersangkutan secara sistemik dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan.

Evaluasi kelembagaan ditujukan pada apa yang dikerjakan oleh para aktor kelitbangan dalam melaksanakan tugas kelitbangan masing-masing. Evaluasi kelembagaan dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Pertama, sebagai Koordinator Pelaksana RIK, BPPSD melakukan evaluasi teknis dan monitoring terhadap pelaksanaan RIK. Kedua, sebagai Pelaksana, OPD melaksanakan kegiatan kelitbangan sesuai dengan kebutuhan kelitbangan yang diperlukan untuk mendukung tugas dan fungsi masing-masing dengan berpedoman kepada RIK. Ketiga, sebagai Pengawas, Inspektorat melaksanakan kegiatan pengawasan pelaksanaan kelitbangan dengan berpedoman pada RIK dan tertuju pada dimensi struktur dan proses organisasi sebagaimana Peraturan Kemenpan-RB di atas.

Evaluasi koordinasi pelaksanaan dalam proses manajemen dan pelaksanaan dapat diukur melalui 5 (lima) indikator komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi, serta kontinuitas perencanaan. Merujuk pada Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA, maka indikator evaluasi program prioritas mempunyai indikator yang disesuaikan dengan tema kelitbangan.

Evaluasi terhadap koordinasi pelaksanaan kerja difokuskan pada tingkat kesesuaian dalam perencanaan, pelaksanaan dan peningkatan target dalam kerjasama intra BPPSD dan antara BPPSD dengan berbagai OPD dalam pemerintahan daerah serta BPPSD dengan pelaku kelitbangan pada tingkat kota/kabupaten. Hal itu perlu ditunjang dengan evaluasi terhadap koordinasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan dalam hal peningkatan konsistensi pelaksanaan terhadap perencanaan kegiatan kelitbangan dalam pemenuhan sasaran, di samping peningkatan konsistensi perencanaan tersebut terhadap penganggaran kegiatan.

Evaluasi terhadap koordinasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan juga perlu dilakukan untuk menilai apakah koordinasi itu dimaksudkan untuk memenuhi amanat Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, yaitu:

- a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan;
- b. memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang ditetapkan oleh pejabat fungsional keahlian;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada kepala Badan Litbang Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

Evaluasi koordinasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan itu dapat dilakukan pada tengah dan akhir proses tahun anggaran berjalan dengan inisiatif dari BPPSD. Masukan yang diperoleh pada momen tengah proses dimaksudkan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan kelitbangan pada semester berikutnya, sedangkan rekomendasi yang diperoleh pada akhir proses per tahun dilakukan untuk perbaikan koordinasi kelitbangan pada tahun berikutnya. Hal sama dilakukan setiap tahun sampai dengan akhir periode RIK berjalan.



## BAB V

# PENUTUP

Rencana Induk Kelitbangan (RIK) DIY 2022-2027 ini merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi, tahapan, dan rincian indikasi program kelitbangan di lingkup Pemerintah Daerah DIY yang dijabarkan dalam tema-tema kelitbangan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, ekonomi, sosial dan budaya, serta sarana-prasarana (infrastruktur).

Tujuan RIK ini adalah untuk memberikan masukan dalam penyusunan atau perubahan RPJMD DIY, sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan program kelitbangan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, ekonomi, sosial dan budaya, serta sarana-prasarana (infrastruktur) dalam lingkup Pemerintahan Daerah DIY. Sasaran RIK adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program kelitbangan Pemda DIY guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, ekonomi, sosial dan budaya, serta sarana-prasarana (infrastruktur).

RIK DIY 2022-2027 disusun melalui proses yang diskusi dengan stakeholder terkait, *desk study*, diskusi di antara penyusun, presentasi draft pertama kedua dan ketiga di hadapan forum diskusi, perbaikan draf, diskusi internal penyusun, FGD internal dan disinkronisasi dengan aneka aturan perundangan terkait agar RIK ini bukan hanya memiliki kekuatan akademik tetapi juga memiliki pijakan yuridis yang kokoh. Penyusun RIK DIY 2022-2027 juga melakukan identifikasi potensi, permasalahan, peluang, dan

tantangan, hingga isu-isu pokok dan indikasi program-program prioritas. Untuk memperkaya penyusunan RIK, dilangsungkan diskusi dengan para OPD di lingkungan pemerintah daerah DIY sehingga memperoleh masukan, kritik dan saran dalam perbaikan penulisan RIK DIY 2022-2027.

Pihak yang dilibatkan juga menjangkau kalangan lebih luas, yaitu dengan mengundang para Tenaga Ahli (TA) dari perguruan tinggi di DIY, untuk memberikan pandangan, masukan, kritik dan saran dalam perbaikan penyusunan RIK. Dengan demikian, penyusunan RIK ini tidak hanya melibatkan diskusi dengan para mitra internal OPD di pemerintah daerah DIY, tetapi juga masukan dari OPD pemerintah kabupaten/kota dan tenaga ahli yang berasal dari perguruan tinggi terkemuka di DIY.

# DAFTAR BACAAN

- Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah (BPPSD), (2018), “Grand Design Tema Penelitian (Rencana Induk Kelitbangan) Daerah Istimewa Yogyakarta 2019-2022, *Laporan*, BPPSD Bappeda DIY, Yogyakarta.
- Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah (BPPSD) Bappeda DIY, (2021), “Analisis Makro Ekonomi DIY”, *Laporan Akhir*, BPPSD Bappeda DIY, Yogyakarta.
- Bappeda DIY, (2020), “Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY 2021”, *Laporan*, Bappeda DIY, Yogyakarta.
- BPS DIY, (2020), “Indikator Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta 2019/2020”, Yogyakarta.
- BPS DIY (2021a), “Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan I-2021”, *Berita Resmi Statistik*, BPS DIY. Yogyakarta.
- BPS DIY (2021b), “Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Bulan Juni 2021”, *Berita Resmi Statistik*, BPS DIY. Yogyakarta.
- BPS DIY, (2021c), “Statistik Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta 2020”, *Laporan*, BPS DIY, Yogyakarta.
- BPS DIY (2021d), “Profil Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Maret 2021”, *Berita Resmi Statistik*, BPS DIY. Yogyakarta.
- BPS DIY (2021e), “Rasio Gini Daerah Istimewa Yogyakarta Bulan Maret 2021”, *Berita Resmi Statistik*, BPS DIY. Yogyakarta.
- BPS DIY, (2021f), “Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta 2020”, *Laporan*, BPS DIY, Yogyakarta.
- BPS DIY, (2021g), “Data Strategis Statistik Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta 2021”, *Laporan*, BPS DIY, Yogyakarta.

- BPS DIY, (2021h), "Analisis Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 (Pendekatan 54 Kategori dan Sub Kategori Usaha)", Laporan, BPS Provinsi DIY, Yogyakarta.
- Bank Dunia, (2016), "Mengatasi Ketimpangan Penting untuk Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem di Tahun 2030", *Press Release*, 2 Oktober 2016, diakses dari <https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2016/10/02/tackling-inequality-vital-to-end-extreme-poverty-by-2030> pada tanggal 25 November 2020
- Dartanto, T., (2017), "Ketimpangan di Indonesia Makna dan Solusi Mengatasinya", *Kolom Pakar*, Media Indonesia, 27 Februari 2017, diakses <https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/94143/ketimpangan-di-indonesia-makna-dan-solusi-mengatasinya> pada tanggal 25 November 2020
- Pemda DIY, (2017)., "Rencana Pembangunan Jangka Menengah DIY 2017-2022", *Laporan*, Yogyakarta.
- Pemda DIY, (2009)., "Rencana Pembangunan Jangka Panjang DIY 2005-2025", *Laporan*, Yogyakarta.



**BALAI PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**